



Siapa Menjarah Uang Rakyat?

Di tengah carut-marut perjuangan menuntut kebebasan atas "penjajahan" pemerintah pusat, di Riau sendiri ternyata juga berlangsung "penjajahan" terhadap rakyatnya. Hal ini tercermin dari apa yang dapat diamati dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan pemerintah provinsi kepada anggota dewan (DPRD). Parahnya lagi, aksi "penjajahan" terhadap uang rakyat ini sering dilakukan terencana oleh aparat birokrasi pemerintahan.

Sementara itu, program ekonomi kerakyatan yang menjadi "Pilar Pertama Pembangunan" di Riau, akibat dari adanya aksi penjajahan ini, pada akhirnya hanya tinggal "retorika" belaka. Dan pada dasarnya, slogan upaya pemberdayaan pun, justru mendatangkan sebuah tragedi. Ya, tragedi besar dari sebuah sistem yang hanya menurutkan hawa nafsu kekuasaan dan harta dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sedang berlangsung.

Buku *Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Riau Menuju Alaf Baru* merupakan kritikan tajam **Edyanus Herman Halim** dalam melihat kesenjangan ekonomi yang melanda masyarakat Riau dalam menyongsong era globalisasi dan implementasi ekonomi kerakyatan yang tidak mencapai sasaran. Kritikan tajam, yang menggambarkan akan ketertindasan rakyat kecil, akibat kekuasaan yang hanya mengandalkan hawa nafsu, adalah sebuah realita yang coba dipaparkan penulis.

Penerbit
Unri Press

ISBN 979-8692-68-3



9 789798 692680 >

SIAPA MENJARAH UANG RAKYAT?

EDYANUS HERMAN HALIM

Edyanus Herman Halim

Siapa Menjarah Uang Rakyat?

TRAGEDI DAN UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI RAKYAT RIAU
MENUJU ALAF BARU

Pengantar DR. Sjahrir



Goncangan perekonomian Indonesia, akibat merosotnya nilai rupiah, memberi warna suram bagi tumbuhnya perekonomian Riau. Dua dari sektor unggulan perekonomian Riau terbabat habis. Sektor industri yang kontribusinya mencapai 30,75 persen sebelum krisis, tumbuh sebesar 13,73 persen. Pada saat pra krisis, pertumbuhannya merosot menjadi hanya 8,64 persen. Sedangkan, pada saat pasca krisis, turun secara tajam menjadi minus 4,21 persen. **(Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru, hlm. 23)**

Fenomena politik di Riau, belum searah dengan keinginan untuk memberdayakan rakyat. Pada beberapa kabupaten dan kota yang baru dimekarkan, nuansa dan wacana politik yang mengemuka adalah permasalahan anggota dewan dan pemulihan bupati defenitif. **(Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2), hlm. 34)**

Selama ini, secara ekonomi, rakyat selalu terkungkung dalam dua pilar yang sangat kokoh. Pertama, kekuatan birokrasi yang menciptakan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat. Rakyat menjadi objek yang hanya layak untuk dieksploitisir. Kedua, kekuatan modal dari sebahagian kecil masyarakat yang berkooptasi dengan birokrasi. Akibatnya akses masyarakat seperti membentur tembok. **(Memberdayakan Ekonomi Rakyat, hlm. 75)**

Di tengah hiruk-pikuknya perjuangan tuntutan kebebasan atas "penjajahan" pemerintah pusat, di daerah Riau sendiri berlangsung hal-hal yang sangat memprihatinkan dan diduga sangat erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bersih (penjarahan). Dugaan terhadap upaya "penjarahan" terhadap uang rakyat secara terencana menjadi muncul, mengingat pos-pos pengeluaran yang terdapat dalam RAPBD lebih cenderung mengucur ke aparat birokrasi ketimbang diterima rakyat sebagai pemilik yang sah. **(Siapa "Menjarah" Uang Rakyat Riau?, hlm. 85)**

Para konglomerat, yang tergolong masyarakat kelas atas, menjadi tidak kreatif, karena dengan berkolusi, mereka sudah memperoleh rente yang besar. Rakyat kebanyakan yang berada pada lapis bawah, tidak tumbuh prakarsanya, karena sengaja "disumbat" oleh kaum birokrat yang kolutif. Aparat sendiri hanya kreatif untuk semakin memperkokoh dominasi kekuasaannya. **(“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, hlm. 90)**

Membaiiknya nilai rupiah menyebabkan pendapatan masyarakat petani kembali terkoreksi sampai 70 persen. Sementara itu, harga-harga tidak beranjak turun secara memadai. Akibatnya, proses pemiskinan rakyat pun kembali terjadi, karena daya beli mereka turun secara drastis. Dalam konteks inilah, sebenarnya sangat dibutuhkan kebijaksanaan strategis agar fluktuasi ekonomi tidak menyebabkan rakyat makin terombang-ambing. **(Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat, hlm. 95)**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak usaha industri yang berguguran menghadapi gonjangan krisis perekonomian. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami booming. Kondisi ini terjadi akibat dari strategi pengembangan industri di Indonesia yang tidak memiliki format yang profesional. **(Signifikansi Industri Berbasis Rakyat, hlm. 80)**

.....Di samping itu yang berkembang hanya industri berskala besar dan menengah yang terpusat pada wilayah perkotaan. Sementara wilayah pedesaan, belum tersentuh secara seimbang. Kesenjangan ini, pada akhirnya hanya melahirkan urbanisasi prematur dan deformasi struktural dalam perekonomian. **(Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan Bersaing, hlm.100)**

Dalam kenyataannya, program atau kebijaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang sudah mulai digulirkan, khususnya di Riau, mengalami berbagai hambatan yang sangat "prinsipil". Sehingga hasil yang ingin dicapai, sepertinya hanya menjadi "mimpi indah" belaka. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya indikasi akan ketidakberhasilan program IDT di masa yang akan datang. **(IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjajahan Ekonomi, hlm. 108)**

Pemerintah, khususnya instansi terkait, seharusnya menjadikan keterbelakangan informasi ini sebagai salah satu faktor dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Ironis sekali, jika instansi tersebut juga sangat kekurangan informasi tentang UKM itu sendiri. Sebab dengan begitu,, maka UKM tidak akan pernah keluar dari "lingkaran setan" yang melilitnya. **(Secangkir Kopi Segudang Informasi, hlm. 117)**

Pihak pengusaha, dalam menanggapi tuntutan masyarakat, selalu mengembangkan program community development. Secara konseptional, menurut mereka (baca: pengusaha) programnya ini telah sangat baik. Pola pendekatannya berpijak pada pengembangan fisik ke SDM yang mulai dari sistem donasi, sampai pada sistem partisipasi.

Akan tetapi, setelah lama berjalan, program ini menghadapi kendala klasik, yakni adanya perbedaan persepsi antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, di samping kendala-kendala internal yang ada pada kedua belah pihak. **(Mengapa Persepsi tak Pernah Sama, hlm. 133)**



76236

**SIAPA MENJARAH UANG
RAKYAT? TRAGEDI DAN
UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI RAKYAT RIAU
MENUJU ALAF BARU**

No. AGENDA	247/19.13/PT.20.01
TANGGAL	20.12.2001
PARAF	#

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No. 100/11/1987
JABANG
PAKAF

Edyanus Herman Halim

Siapa Menjarah Uang Rakyat?

**TRAGEDI DAN UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI RAKYAT RIAU
MENUJU ALAF BARU**

388.959 814
Hal
5

Pengantar DR. Sjahrir

**Penerbit
Unri Press Pekanbaru
2001**

Judul : *Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Riau Menuju Alaf Baru*
Penulis : Edyanus Herman Halim
Penyunting : Zulkarnain

Sampul: M. Hasbi
Perwajahan: Sahrul Tombang
Diterbitkan pertama kali oleh Unri Press

Alamat Penerbit:
Unri Press Jl. Pattimura 9 Pekanbaru 28132 Riau
Telp./Fax. (0761) 22961
e-mail: unripress@hotmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Cetakan pertama: Oktober 2001

Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Halim, Edyanus Herman
Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Riau Menuju Alaf Baru /
oleh Edyanus Herman Halim; Pengantar DR. Sjahrir. --
Pekanbaru : UNRI Press, 2001
156 hlm. ; 20 cm.
ISBN 979-8692-68-3
1. Riau -- Politik Ekonomi. I. Judul.
388.959.814

*Karya ini dipersembahkan:
buat istriku tercinta
(alm.) Wulan Kartikasari, S.Kb*

sasarannya dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang tertuang dalam RAPBD yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Lebih jelasnya lagi, lihatlah pada imple-mentasi RAPBD Riau tahun 2001 lalu. Dari sekian jumlah dana yang dibanggakan, realisasinya yang betul-betul menciontop masyarakat hanya sekian persennya saja.

Selengkapnya, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa sisanya telah dibelanjakan secara sewenang-wenang dan diabaikan. Dengan mengalokasikan dana ke bermacam-macam seperti misalnya biaya untuk pembelian banal, biaya administrasi, biaya identifikasi dan seleksi calonlah.

Pengantar Penulis

Diselewengkan, Digaruk, dan Dijarah

“Uang rakyat diselewengkan, uang rakyat digaruk, uang rakyat dijarah.”

Kalimat-kalimat tak sedap di atas, tentunya sudah sering kita dengar dan kita baca. Ia seakan-akan telah menjadi tontonan dan makanan empuk kita sehari-hari, bila kita menyimak informasi, baik itu pada *headline* surat kabar ataupun berita utama pada siaran media televisi. Aksi penyelewengan, penggarukan, maupun penjarahan uang rakyat ini, jika dilihat dalam konteks Indonesia pada umumnya, dan provinsi Riau pada khususnya adalah sebuah realita yang tidak dapat kita dipungkiri lagi keabsahannya.

Aksi ini benar-benar terjadi. Peristiwa ini betul-betul nyata adanya. Tidak usah dibantah lagi. Jangan sampai dicarikan justifikasinya. Sebab, banyak sudah contoh kasus yang dapat kita jadikan referensi. Contoh terkecil adalah terlihat di pelupuk mata kita, bagaimana tidak tepat

sasarannya dana pemberdayaan ekonomi rakyat yang tertuang dalam RAPBD, yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Lebih detailnya lagi, lihatlah pada implementasi RAPBD Riau tahun 2001 lalu. Dari sekian jumlah dana yang dianggarkan, realisasinya yang betul-betul menyentuh masyarakat, hanya sekian persennya saja. Selebihnya?

Selebihnya, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa sisanya tentu lebih banyak diselewengkan, digaruk dan dijarah oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Dengan menghalalkan berbagai cara dan bermacam alasan, seperti misalnya biaya untuk perjalanan dinaslah, biaya administrasilah, biaya identifikasi dan seleksi calonlah, maupun dana untuk pelatihan-pelatihan, yang kesemuanya ini hampir menelan biaya lebih dari setengah yang dianggarkan. Ini masih yang melalui prosedur. Bagaimana dengan yang di luar prosedur, seperti pemotongan-pemotongan gelap misalnya?

Di tengah-tengah jargon pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan —terjadinya aksi penyelewengan, penggarukan dan penjarahan ini— terhadap dana yang justru diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, tentunya menjadi bertolak belakang dari tujuan semula. Oleh sebab itu, adalah suatu hal yang wajar, jika pada akhirnya pemberdayaan ekonomi rakyat —program ini menjadi Pilar Utama Pembangunan di Riau— masih terasa hambar dan menyedihkan.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila

para aktor penjarahan ini menyanggirkan senyum kepuasan, karena *booming* dana yang begitu besar akan masuk ke kantong pribadi mereka, sementara pada sisi lain jeritan rakyat menjadi tidak berarti apa-apa. Ironisnya lagi, para anggota dewan setempat (DPRD), yang merupakan wakil mereka (rakyat) untuk menyalurkan aspirasinya, tidak memiliki *political will* dalam menyikapi persoalan ini. Sehingga pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi rakyat ini hanya menjadi sebuah tragedi besar yang cukup menyedihkan.

Selain persoalan adanya aksi penyelewengan, penggarukan dan penjarahan ini, masalah penting lainnya yang juga menjadi penghambat dalam upaya mengimplementasikan proses pemberdayaan ekonomi rakyat, juga datang dari belum adanya model pendekatan yang terpadu dan terangkai secara apik. Masing-masing sektor masih kelihatan saling berdiri sendiri dan maju dengan programnya, tanpa memikirkan kait-kelindannya dengan program yang lain. Padahal dalam konsep pemberdayaan ekonomi, sangat penting untuk diperhatikan beberapa hal yang menjadi kunci berhasil atau gagalnya suatu program.

Di antara beberapa kunci yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu konsep dapat dilihat dari, yaitu kepemilikan terhadap aset ekonomi, akses terhadap pasar, kapabilitas dan kompetensi usaha, ruang gerak yang adil dan demokratis, adanya saling keterkaitan antar pelaku ekonomi yang terbentuk atas dasar input-output, serta aspek kepedulian terhadap lingkungan usaha. Penataan aspek-aspek tersebut di ataslah yang akan mampu membawa rakyat pada suasana kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Tanpa semua itu, konsep pemberdayaan ekonomi

rakyat hanya akan menjadi ajang “seleweng-menyeleweng,” “garuk-menggaruk,” dan “jarah-menjarah” belaka.

Satu hal yang pasti, kita sesungguhnya tidak ingin melihat persoalan ini menjadi berlarut-larut, tanpa ada *win-win solution* yang dapat kita jadikan penawar untuk mengobati penyakit kronis ini. Ke depan, setidaknya ada beberapa *entry point* yang sangat dibutuhkan dalam kebijaksanaan strategis demi terhindarnya rakyat dari keadaan yang terombang-ambing.

Pertama, implementasi demokrasi ekonomi harus dijalankan secara konsisten melalui kebijaksanaan pembangunan yang memihak rakyat. Penting sekali diupayakan agar rakyat memiliki kesempatan untuk memperoleh aset ekonomi yang mampu menjamin kehidupan ekonominya secara berkelanjutan.

Kedua, eksploitasi sepihak yang membuat rakyat tidak berwenang dalam pembangunan harus segera dihentikan. Sayangnya, ini belum menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Riau. Dalam perencanaan pembangunan misalnya, prinsip yang diterapkan masih bersifat *top-down*.

Ketiga, hambatan-hambatan struktural yang selama ini ditemui di lapangan harus segera dihapus melalui koordinasi yang integratif. Semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat mesti memiliki kesamaan visi dan kinerja mutu yang optimal.

Mengakhiri pengantar ini, dengan kerendahan hati patut saya akui bahwa buku ini tidak akan hadir di tangan pembaca tanpa uluran tangan atau kerjasama dari berbagai pihak.

Kepada Bapak Dr. Sjahrir (Ketua PIB), yang di tengah kesibukannya masih sempat meluangkan waktunya untuk sedikit memberikan catatan (pengantar) dalam buku sederhana ini. Para pimpinan dan rekan-rekan di media cetak yang telah bersedia menampilkan percikan-percikan pemikiran saya dalam bentuk lisan maupun tulisan, patut saya berikan penghargaan.

Penghargaan juga saya berikan kepada Sdr. Zulkarnain, Redaktur SKK *Bahana Mahasiswa* Universitas Riau, yang dengan ketekunannya telah berhasil menyunting tulisan saya yang bertebaran di media massa menjadi buku yang sekarang berada di tangan pembaca. Sdr. Elmustian Rahman dari *Unri Press* Pekanbaru atas kesediaannya menerbitkan buku ini, juga patut saya hargai di sini. Dan, kepada semua yang telah ikut berjasa membantu terselesaikannya buku ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Satu hal yang pasti, saya menyadari bahwa buku ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Bak kata orang bijak, “tiada komputer yang tidak dimasuki virus”, begitu juga dengan karya ini, belumlah lepas dari kekurangan-kekurangan. Untuk itu, tangan saya selalu terbuka menerima kritik dan saran pembaca, demi perbaikan esok hari.***

Pekanbaru, 27 Oktober 2001
Edyanus Herman Halim, SE., MS



Pengantar DR. Sjahrir

Keprihatinan Kita Melihat Nasib Rakyat

Pikiran yang berkecamuk di benak rakyat tentang makna pembangunan saat ini adalah pengorbanan. Lebih dari 32 tahun lamanya hidup di bawah rezim otoriter Soeharto, rakyat berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara fisik, investasi besar yang diintrodusir melalui program dan berbagai proyek memang dapat dilihat, namun pengalaman menunjukkan bahwa “tumbal-tumbal” pembangunan senantiasa ada di sana-sini.

Pelaksanaan pembangunan selalu saja menempatkan rakyat sebagai korban. Sementara para penguasa dan pengusaha, tetap berada pada pihak yang diuntungkan. Bukti konkret tentang rakyat yang selalu dikesampingkan, secara lugas dapat dicermati pada beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman di Riau misalnya, sebagaimana yang diamati dan ditulis Saudara Edyanus dalam buku ini, jelas sekali menunjukkan bahwa eksploitasi

terhadap sumberdaya alam Riau, merupakan keputusan sepihak yang sangat tidak menguntungkan rakyat. Tidak hanya di daerah, di kota-kota besar pun, marginalisasi hak rakyat juga terjadi. Bila dikaitkan dengan eksistensi masyarakat daerah, keadaannya malah makin parah.

Buku *Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Riau Menuju Alaf Baru* yang ditulis Saudara Edyanus Herman Halim ini, pada dasarnya mendeskripsikan banyak hal yang harus kita pikirkan dalam mencermati kompleksnya persoalan yang melanda perekonomian bangsa kita dewasa ini. Mulai dari tantangan ekonomi yang akan kita hadapi dalam menyongsong globalisasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, hingga persoalan program ekonomi rakyat, yang selama ini tidak lebih dari sekadar “retorika” belaka.

Hal yang cukup menarik yang perlu saya tekankan dalam buku ini adalah pembahasannya tentang fenomena pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Seperti kita ketahui bersama, usaha kecil dan menengah telah terbukti memberikan kontribusi yang baik sekali kepada pertumbuhan ekonomi tahun 2000 dari sisi kegiatan konsumsi serta pertumbuhan di sektor ekspor. Dilihat dari potensi yang begitu besar dari usaha kecil dan menengah ini, dibutuhkan peningkatan upaya yang berkesinambungan oleh masyarakat dan pemerintah.

Di dalam upaya tersebut termasuk proses pelatihan, pembukaan dan pengembangan pasar, baik pada pasar ekspor maupun pasar nasional, serta bantuan teknis yang memungkinkan usaha kecil dan menengah dapat membuat proposal teknis bagi pemberian kredit. Hal tersebut, dapat

dilakukan melalui koordinasi kerjasama antara departemen keuangan, departemen perindustrian dan perdagangan, dan kementerian negara yang mengurus usaha kecil dan menengah, serta koperasi.

Selain itu, amat penting untuk membuat monitoring secara nasional tentang perkembangan usaha kecil dan menengah, serta koperasi yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) dari sisi penguatan kelembagaan perusahaan-perusahaan dan koperasi yang dapat dikerjakan melalui kerjasama dengan Bappenas dan Bappeda. Dalam hal ini, monitoring kegiatan kelembagaan tersebut dapat menjadi bahan bagi sektor keuangan untuk melihat kapasitas, potensi, dan prospek usaha-usaha kecil dan menengah tersebut, sekaligus mengembangkan kemungkinan pola pembiayaannya.

Pada akhirnya, ke depan, kita sangat mengharapkan peran usaha kecil dan menengah ini bisa menjadi barometer bagi kebangkitan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip kerakyatan. Dengan begitu, pembangunan betul-betul menempatkan rakyat pada posisi penting. Semua ini, pada dasarnya ditujukan demi berlangsungnya landasan kebijaksanaan bagi restrukturisasi, rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional. Yang terpenting adalah rakyat tahu kepada siapa mereka meletakkan kepercayaan dan harapannya itu.

Melalui buku ini, Saudara Edyanus mencoba mengungkapkan keprihatinannya atas kesewenang-wenangan para penguasa terhadap nasib rakyat kecil. Dengan bahasanya yang lugas dan tajam, ini dapat dilihat dari judul besar bukunya 'Siapa Menjarah Uang Rakyat', dia mencoba mengingatkan kita semua bahwa selama ini slogan

pemberdayaan ekonomi rakyat hanyalah sekadar retorika belaka. Dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut, lebih banyak diselewengkan, atau dalam bahasa Edyanus-nya “dijarah” oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, dibandingkan dengan yang sampai ke tangan rakyat, pemiliknya yang sah.***

Jakarta, Oktober 2001

Dr. Sjahrir

(Ketua Perbimpunan Indonesia Baru)

Daftar Isi

Pengantar Penulis	
Diselewengkan, Digaruk, dan Dijarah	9
Pengantar Dr. Sjahrir	
Keprihatinan Kita Melihat Nasib Rakyat	13
Daftar Isi	19

Bagian Satu:

Prospek dan Tragedi Perekonomian Riau

Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru	23
Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (1)	29
Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2)	34
APBN 2001: Implikasi “Pelecehan” Riau	39
IMS-GT dan Riau: Sebuah Perkawinan tak Seimbang	44
Krisis dan Keterpurukan Investasi Riau	50
Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (1) (<i>Mencermati “Deklarasi Bali”</i>).....	56
Catatan Kecil Untuk Kadinda Riau (2) (<i>Bercermin pada “Kesepakatan Adelaide”</i>).....	61
Signifikansi Embargo Ekonomi Riau	67

Bagian Dua:
Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan atau Penjarahan?

Memberdayakan Ekonomi Rakyat <i>(Dalam Perspektif Adat Kuantan Singingi)</i>	75
Signifikansi Industri Berbasis Rakyat	80
Siapa “Menjarah” Uang Rakyat Riau? <i>(Implementasi Ekonomi Kerakyatan RAPBD Riau 2001)</i>	85
“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	90
Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat	95
Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan Bersaing	100
IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjajahan Ekonomi	108

Bagian Tiga:
Masih Adakah Tempat Untuk “Sikecil”?

Secangkir Kopi, Segudang Informasi <i>(Kunci Sukses “Po- sitioning” Usaha Kecil Menengah)</i>	117
Mendukung Pemberdayaan UKM Riau	122
Model “Community Development” <i>(Untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Riau)</i>	127
Mengapa Persepsi tak Pernah Sama? <i>(Menggugat Kebijaksanaan Community Development Riau)</i>	133
APEC, Industri Kecil dan Kesiapan Birokrasi	138
Membakukan Peran Usaha Kecil	144
Prospek UKM Menghadapi Era Otonomisasi	149

Sumber-sumber Tulisan	153
Tentang Penulis	155

Bagian Satu:

**Prospek dan Tragedi
Perekonomian Riau**

Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru

MEMPROYEKSIKAN perkembangan perekonomian Riau memasuki alaf baru (millenium ketiga) dihadapkan pada beberapa kendala yang substantif terkait dengan data. Pada masa ini, tidak dapat dijamin sejauh mana akurasi data dan validitasnya, mengingat berbagai gejolak pada masa sebelum dan saat krisis. Akibatnya komitmen terhadap data diperkirakan merosot pula.

Mengamati kondisi yang ada, paling tidak, saat ini yang dapat dilakukan hanyalah membuat prediksi jangka pendek yang mengacu pada gejala-gejala dinamika ekonomi jangka pendek pula. Bagaimanapun, data statistik yang dikeluarkan BPS merupakan acuan yang paling mungkin digunakan. Oleh karena itu, prediksi ekonomi ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang digunakannya.

Guncangan ekonomi Indonesia akibat merosotnya nilai tukar rupiah memberi warna suram bagi tumbuhnya perekonomian Riau. Dua dari sektor unggulan perekono-

mian Riau terbabat habis. Sektor industri yang kontribusinya mencapai 30,75 persen sebelum krisis, tumbuhnya sebesar 13,73 persen. Pada saat pra krisis, pertumbuhannya merosot menjadi hanya 8,64 persen. Sedangkan pada saat pasca krisis, turun secara tajam menjadi minus 4,21 persen.

Keadaan ini terjadi karena industri di Riau pada umumnya padat modal dan banyak menggunakan produk impor. Peran industri kecil dalam menembus pasar asing masih relatif kecil mengingat orientasi pasar mereka lebih banyak ke pasar dalam negeri. Sedangkan industri besar beroperasi dengan biaya ekonomi yang cukup tinggi, sehingga koreksi terhadap pendapatan bersinerji dengan membengkaknya biaya produksi menyebabkan sektor industri sulit untuk bangkit dalam jangka pendek.

Memasuki alaf baru nanti, perkembangan sektor industri masih sangat tergantung pada membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia. Tingkat bunga pinjaman yang masih tinggi dan kisaran nilai tukar yang belum stabil, menyebabkan investor sulit menggerakkan ekonomi di sektor industri. Pilihan yang paling mungkin adalah mengembangkan industri hilir sektor pertanian, meskipun dalam skala ekonomi yang relatif kecil.

Dalam hubungan ini, pemerintah harus memilih komoditas-komoditas yang memiliki nilai komparatif dan memadukan pembinaan ke arah mutu (kualitas), agar produk daerah dapat dipasarkan secara global untuk menunjang terbukanya lapangan usaha dan kesempatan kerja baru.

Sektor perdagangan, meskipun masih terkoreksi cukup tajam sehingga pada masa pasca krisis hanya mampu tumbuh sebesar 0,40 persen, memasuki awal alaf baru

mendatang diperkirakan akan menunjukkan gejala yang membaik. Sistem tata niaga yang sebelum ini amburadul oleh badai krisis ekonomi, diperkirakan mulai akan menemukan kembali formatnya. Namun demikian, pertumbuhannya akan tetap lambat karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Memperbaiki sektor perdagangan ini akan memberi peluang bagi Bergeraknya sektor lain, seperti jasa dan angkutan. Hanya saja kenaikan tarif angkutan yang direncanakan diberlakukan pada tahun 2000 mendatang dapat memukul kembali sektor perdagangan karena membengkaknya harga jual. Sementara itu, daya beli masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Kemudian, sektor pertanian yang selama krisis ekonomi justru menunjukkan *booming*. Ini, justru akan menunjukkan gejala pertumbuhan yang melambat. Selama ini, pertanian di Riau sangat monokultur dan sangat banyak dikuasai para "pemburu rente" yang berinvestasi dengan mengandalkan kekuasaan birokrasi.

Dewasa ini berbagai kasus di sektor perkebunan justru muncul, yang diperkirakan akan membawa dampak pada kinerja sektor ini. Berbagai kelompok masyarakat yang selama ini merasa hak dan marwahnya dirampas oleh berbagai perusahaan perkebunan melakukan perlawanan secara terorganisir. Perlawanan rakyat petani ini jelas akan memberikan sumbangan yang negatif pada sektor pertanian di masa yang akan datang.

Mengingat banyaknya masyarakat yang hidup di sektor pertanian, pemerintah hendaknya lebih progresif untuk mengembangkan pertanian rakyat berdasarkan konsep

perwilayahan. Ini penting, untuk melahirkan diversifikasi hasil produksi pertanian yang memiliki nilai jual internasional. Keterkaitan fungsional antar struktur industri dan pertanian harus diarahkan pada komoditas yang erat dengan kehidupan masyarakat dan mempunyai peluang pasar yang baik.

Sektor keuangan dan perbankan di awal alaf baru mendatang masih akan menunjukkan wajah yang suram. Secara nasional, belum tuntasnya berbagai kasus perbankan menyebabkan sektor ini sulit menemukan jati dirinya kembali. Sementara isu-isu Y2K sedikit banyak menyebabkan arus dana perbankan akan mengalami defisit. Prinsip kehati-hatian masih akan tercermin dari dunia perbankan Indonesia yang dengan sendirinya akan menyulitkan Bergeraknya sektor riil. Fungsi institusi perbankan sebagai *intermediary business* belum akan berjalan normal.

Pada sisi lain, isu kenaikan tarif listrik untuk mengurangi subsidi telah menimbulkan reaksi yang kurang positif bagi pelaku ekonomi. Mereka mulai melakukan ancap-ancang untuk mengamankan bisnisnya dengan menaikkan harga atau melakukan efisiensi yang tidak searah dengan kebutuhan perbaikan ekonomi secara makro. Masyarakat yang daya belinya sudah sangat rendah, menanggapi dengan skeptis dan bahkan dapat memicu kerawanan sosial yang justru sangat kontradiktif dengan perbaikan upaya ekonomi secara keseluruhan.

Secara umum, perekonomian Riau pada awal alaf baru dapat saja mengalami perbaikan. Hanya saja, untuk itu diperlukan beberapa persyaratan yang justru berada di luar tatanan perekonomian itu sendiri. *Pertama*, sangat dibutuhkan

suatu konsensus antar struktur masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Pernik-pernik kerawanan sosial sudah mulai mengemuka, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kondisi ini tentunya sangat merugikan upaya perbaikan ekonomi Riau ke depan.

Tidak satu kelompok masyarakatpun yang akan diuntungkan, jika kerusuhan sosial terjadi di Riau mengingat tidak adanya satu kelompok masyarakatpun yang memiliki kekuatan yang dominan. Tanpa adanya konsensus yang positif bagi perkembangan Riau secara bersama tidak akan diperoleh format perbaikan ekonomi yang jelas.

Kedua, kesuksesan melalui pemilu lokal akan sangat besar artinya bagi tercapainya stabilitas kehidupan masyarakat di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu lokal sedikit banyak akan memberi warna tersendiri bagi perkembangan perekonomian di wilayah ini, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah kabupaten yang baru.

Ketiga, kepastian tentang otonomisasi, baik pelaksanaan format yang sudah ada sekarang, maupun reformasi ke arah sistem yang lebih menjamin pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Semakin otonom suatu daerah maka semakin mungkin diupayakan perbaikan ekonomi wilayah itu. Ini berarti perekonomian Riau akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan konsekuensi pemerintah pusat tentang otonomisasi.

Terakhir, melihat perkembangan kawasan Asia yang relatif membaik, maka diharapkan memberi pengaruh pada membaiknya perekonomian Riau. Ini dapat terjadi, bila masyarakat Riau dapat diajak secara positif untuk

menangkap peluang-peluang tersebut. Bila tidak, justru yang akan muncul adalah proses kemiskinan tahap kedua yang konsekuensi logisnya, tentu lebih parah dari apa yang selama ini dialami masyarakat Riau.

Bagaimana cara terbaik melakukan ini adalah dengan melakukan konsolidasi proses pelaksanaan pembangunan melalui reformasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasannya.***

Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (1)

TIDAK gampang mereka-reka apa yang akan terjadi di Riau pada tahun pertama alaf baru. Variabilitas faktor yang mempengaruhinya sangat heterogen dengan guncangan yang sangat cepat. Pendekatan yang paling mungkin dilakukan adalah menelaah beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, baik politik maupun ekonomi, pada tingkat global, nasional, dan pada skala lokal.

Banyak ruang-ruang yang mencerminkan wajah pesimis, mengingat berbagai peristiwa yang terjadi sebelum ini menunjukkan makin parahnyanya penyakit bangsa sehingga sulit disembuhkan. Namun, ruang yang tersisa untuk berbenah diri tetap saja ada. Asal dimanfaatkan secara optimal, wajah ceria bukan tidak mungkin akan memantul secara apik.

Fenomena Global

Bakal ada perbaikan dalam perekonomian secara global sejalan dengan membaiknya perekonomian negara-

negara industri, khususnya Amerika Serikat. Meskipun berbagai bursa saham yang menjadi barometer ekonomi dunia, khususnya *New York Stock Exchange*, mengalami *bearis*, namun dengan penurunan suku bunga FED sampai dua kali telah mampu menggairahkan bursa saham tersebut.

Globalisasi sebagai suatu sistem yang internasional yang baru memberikan peluang untuk menstimulus gerakan perekonomian. Banyak orang dapat meragukan kenikmatan pasar bebas, perlindungan hak azazi manusia, dan konsep kemakmuran bersama. Meningkatnya interdependensi ekonomi memberi ruang gerak terselenggaranya proses demokrasi, dan keinginan untuk hidup damai yang saling menguntungkan. Hanya saja, hubungan antar negara masih saja akan diselubungi oleh fenomena klasik yang bertumpu pada keterkaitan antar potensi kekuatan, walaupun bentuknya berubah dari bersifat tradisional kepada adu kekuatan modernisasi.

Indonesia tentunya harus berjuang keras meningkatkan rasa percaya antar sesama bangsa di dunia. *Solo karir* Gus Dur ke manca negara belum memberikan arti positif bagi tumbuhnya kepercayaan asing. Dalam skala regional malah terjadi gesekan-gesekan, seperti timbulnya kesalahpahaman dengan pemerintah Singapura yang dapat mengganggu kolaborasi ekonomi antara kedua negara.

Bagi Riau, fenomena ini merupakan variabel pengganggu yang cukup signifikan. Singapura merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Asia dan pintu gerbang lalu lintas modal mancanegara. Melalui otonomi daerah sebenarnya Riau memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih baik dengan

Singapura. Akibat gesekan-gesekan tadi kesempatan itu dapat tenggelam dengan sia-sia.

Fenomena ASEAN sendiri akhir-akhir ini memunculkan persoalan kredibilitas dan relevansi hubungan kerjasamanya yang dipicu oleh krisis ekonomi, problema domestik negara-negara anggota, aspek tradisi ASEAN. Termasuk sulitnya mengembangkan ASEAN secara institusional. Skandal presiden Filipina dan amburadulnya manajemen pemerintahan Indonesia semakin mempersulit ditemukannya resep yang manjur bagi pemulihan kerjasama ASEAN. Masing-masing negara lebih disibukkan oleh masalah dalam negeri yang kian pelik, sehingga upaya menjalin kerjasama luar negeri kurang memiliki daya dukung positif.

Fenomena Nasional

Kesulitan mempertajam prioritas pemulihan ekonomi di Indonesia tidak saja bersumber dari aspek ekonomi tetapi telah merambah menjadi persoalan multi krisis. Meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan gejala yang membaik, ke depan tidak diharapkan terjadi hal yang serupa. Kurs rupiah yang terperosok menimbulkan rasa cemas bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Bagi rakyat yang bergerak di sektor pertanian merosotnya nilai rupiah justru memberikan berkah dengan naiknya harga komoditas mereka. Bila tidak terdistorsi oleh performa pasar yang cenderung berperilaku monopsoni nilai tambah yang dapat diterima petani Riau akan lebih besar lagi. Ke depan, mengatasi bentuk pasar *kolusi-oligopsonis* ini menjadi pasar persaingan yang sehat dalam komoditas pertanian seharusnya diprioritaskan instansi terkait. Bila

tetap saja hanya ada dua perusahaan eksportir CPO akan senan tiasa sulit mengangkat kesejahteraan para petani.

Pada satu sisi, kepercayaan masyarakat tidak mungkin ditumbuhkan bila nilai tukar rupiah tetap mengalami kemerosotan, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor industri. Walaupun ada geliat naiknya daya beli masyarakat petani, tetapi tidak dapat diandalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Bertopang pada daya dorong konsumsi untuk menggairahkan ekonomi lebih riskan tanpa didukung kemampuan berinvestasi.

Kemampuan Indonesia untuk mengantisipasi para spekulasi sangat mandul, baik secara politik maupun secara ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah masih terkesan amburadul dan kurang menyentuh persoalan dasar yang dihadapi bangsa. Koordinasi antara para pengambil kebijakan nampaknya belum solid sehingga sasaran yang ingin dicapainya terkesan kurang memenuhi target.

Pada skala mikro banyak institusi bisnis yang mengalami kelimpahan sehingga roda perekonomian sektor riil sulit ditingkatkan percepatannya. Justru dalam permainannya menunjukkan gejala-gejala yang kurang sehat sejalan dengan lemahnya sistem hukum negara. Berbagai institusi ekonomi yang bersifat strategis menunjukkan masalah-masalah yang tidak kunjung berakhir. Gonjang-ganjing yang terjadi di BI, tersendatnya restrukturisasi BUMN, dan belum terselesaikannya kasus KKN pada beberapa institusi bisnis yang dikelola negara menghadang upaya-upaya dalam mengembalikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Wajah muram perbaikan ekonomi *dicubiti* pula oleh fenomena

politik yang cenderung mengedepankan budaya partisan dan kelompok. Persoalan-persoalan bangsa yang seharusnya lebih diutamakan menjadi terpinggirkan oleh perilaku-perilaku politik yang mengedepankan pembenaran kepentingan kelompok dan menonjolkan supremasi massa. Keinginan menegakkan supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak demokratisasi dan perilaku ekonomi yang adil tidak ditampilkan.

Berlarut-larutnya persoalan pemilihan ketua MA, semakin memperuncing hubungan legislatif dan eksekutif, kasus Tommy Suharto, skandal Buloggate, dan Bruneigate, persoalan Aceh dan Irian, kasus peledakan bom di beberapa wilayah Indonesia, dan beberapa kasus lainnya yang akhirnya yang sampai akhir tahun 2000 belum dapat dituntaskan, akan menjadi faktor penghambat bagi terselenggaranya mekanisme ekonomi yang mulus.

Persoalan politik dan hukum menjadi semakin rumit ditengarai dengan berbagai produk hukum yang lahir pada zaman Orba karena substansinya memang tidak mengedepankan kepentingan bangsa. Orientasinya lebih mengedepankan kepentingan Suharto dan rezimnya. Anehnya, produk hukum yang ditelurkan pada akhir-akhir ini belum juga mencerminkan kedewasaan berbangsa dan bernegara. Kepentingan politik partisan dan kelompok masih sarat mewarnainya. Kesadaran untuk mengedepankan kepentingan rakyat masih tipis, sehingga cukup sulit memformulasikan produk-produk hukum dan kebijakan yang “renyah” atau sehat bagi masyarakat.***

Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2)

FENOMENA politik nasional yang akan sangat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat di daerah, khususnya Riau adalah keseriusan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Masih banyak aturan pelaksanaan dari UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang harus dibuat agar otonomi dapat berjalan mulus. Sayangnya, tarik-menarik antara pemerintah pusat dengan kepentingan daerah dan ego departemen sektoral menjadi kendala memuluskan implementasinya. Kekhawatiran pusat terhadap daerah dijadikan kambing hitam untuk mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri dalam arti yang sesungguhnya.

Melemahkan legitimasi terhadap pemerintahan Gus Dur akibat adanya kebijakan dan perilaku politiknya menambah sulit penerapan otonomi secara baik. Tanpa perubahan gaya kepemimpinan Gus Dur persoalan-persoalan bangsa ke depan akan tetap terselimuti kekisruhan.

Fenomena Lokal

Fenomena politik di Riau juga belum searah dengan keinginan memberdayakan rakyat. Pada beberapa kabupaten dan kota yang baru dimekarkan nuansa wacana yang mengemuka adalah permasalahan anggota dewan dan pemilihan bupati definitif. Belum lahir upaya antisipasi otonomi daerah yang sehat untuk kepentingan bersama. Kondisi ini memberikan peluang munculnya tindak korupsi dan penyelewengan aparat birokrasi karena kontrol masyarakat yang lemah melalui DPRD.

Pada level provinsi amat disayangkan beberapa perilaku politik yang ditampilkan DPRD sangat melukai hati rakyat, seperti kasus pengkaplingan anggaran untuk kepentingan pendapatan anggota DPRD yang demikian fantastis, usaha pembangunan kantor yang mematok anggaran mencapai Rp. 65 miliar (diduga pula ada *mark up* dalam masalah ini). Termasuk penyediaan fasilitas transportasi mobil dinas yang jumlahnya cukup mencengangkan. Bahkan pada akhir-akhir ini merebak lagi kasus koperasi *tameng* yang digunakan untuk mengkapling lahan sawit.

Dikhawatirkan perilaku-perilaku seperti ini akan merembes pada DPRD di tingkat kabupaten/kota. Gejalanya sudah mulai kelihatan dan upaya pencegahannya sangat sulit karena kontrol dari masyarakat belum dapat ditumbuhkan secara konstruktif. Supremasi massa akhirnya menjadi perjuangan rakyat dan hasilnya tidak produktif bagi tegaknya demokrasi yang sehat.

Pada akhirnya perjuangan masyarakat Riau menjadi kurang solid dan terpolarisasi satu sama lain. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan gagalnya perjuangan CPP Block,

penambangan pasir laut, hutan kemasyarakatan, UU Migas, bagi hasil SDA yang lebih adil, dan banyak lagi kesewenang-wenangan pemerintah pusat yang seharusnya dieliminir meskipun tidak harus meneriakkan “Riau Merdeka”.

Fenomena politik lain yang cukup pelik dihadapi adalah berlarutnya perseteruan politik di Kepri. Diharapkan dengan pelantikan Huzrin Hood sebagai bupati Kepri upaya penyelesaian politik di wilayah itu dapat ditangani dengan baik. Mempersatukan kembali perjuangan rakyat Kepri dengan seluruh rakyat Riau lainnya tentunya akan lebih solid ketimbang terpecah belah. Jiwa besar Huzrin Hood setelah untuk lebih mengedepankan kepentingan Riau secara keseluruhan akan merupakan ujian awal keberhasilannya ke depan.

Elit politik di Kepri maupun dalam level provinsi harus lebih mengedepankan upaya mengatasi rusaknya terumbu karang oleh lubang-lubang penambangan pasir, tercemarnya lahan budidaya rumput laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, rendahnya kualitas SDM, kurangnya infrastruktur pelayanan masyarakat. termasuk masalah-masalah klasik lain yang sulit diungkit dan selama ini membelenggu masyarakat. Transformasi struktural tanpa adanya tranformasi budaya akan menjadi sia-sia. Inilah yang mestinya didahulukan ketimbang terjebak oleh perseteruan kelompok yang tidak produktif.

Prospek Ekonomi Riau

Dalam kegalauan politik seperti di atas; masih adakah celah bagi Riau untuk maju dan berkembang dari aspek ekonomi di tahun ini? Jawaban pertanyaan ini akan sangat

tergantung dari dari kepiawaian Riau memanfaatkan momentum desentralisasi fiskal. Pada tahun 2001 sejalan dengan diimplementasikannya otonomi daerah Riau dapat dikatakan ketiban rezeki anggaran.

Beberapa sektor yang akan mengalami perkembangan pesat seharusnya adalah sektor bangunan, perdagangan, dan telekomunikasi. Pemerintah harus menitikberatkan pembangunannya pada perbaikan infrastruktur. Kebijakan ini akan membuka peluang bisnis konstruksi yang amat pesat. Dua sisi dengan sendirinya akan terangkat, yakni infrastruktur daerah dan pengusaha lokal. Perbaikan sektor telekomunikasi dan listrik. Perkembangan sektor transportasi, listrik, dan telekomunikasi akan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Dipicu oleh adanya pengalihan para pegawai ke wilayah kabupaten Sinergi pendorong perkembangan perdagangan menjadi bertambah. Selanjutnya sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan di daerah akan terpacu pula untuk tumbuh.

Dengan berkembangnya sektor transportasi dan infrastruktur memberi peluang semakin lancarnya lalu lintas barang. Komoditas unggulan masyarakat dapat dikembangkan sebagai andalan ekspor. Bila pemerintah daerah konsisten untuk mengalokasikan 20 % dari APBD untuk pengembangan ekonomi rakyat, maka kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kepentingan masyarakat akan semakin mulus. Bidang lain yang bakal marak adalah perbankan bidang pendidikan. Keinginan untuk meningkatkan SDM Riau merupakan pemacu utama berkembangnya dunia pendidikan di Riau.

Investasi pemerintah dalam bidang ini dapat memacu investasi swasta ke arah itu.

Bila indikator-indikator di atas dapat berjalan secara optimal diperkirakan perekonomian Riau pada tahun 2001 dapat tumbuh mencapai 7-8 persen. Sebenarnya pertumbuhan dapat lebih tinggi, tetapi mengingat bakal adanya distorsi di tingkat lokal dan dorongan pertumbuhan lebih didominasi oleh faktor konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Kekhawatiran yang perlu diwaspadai adalah larinya uang dari Riau akibat pemerintah dan masyarakat tidak mampu memanfaatkan momentum desentralisasi fiskal secara optimal dan konstruktif. Apalagi bila DPRD tidak mampu menjalankan fungsi kontrol masyarakat secara efisien dan efektif. *Jangan sampailah.****

APBN 2000: Implikasi “Pelecehan” Riau

DAMPAK naiknya harga minyak dari 18 dolar AS sebagaimana diasumsikan dalam APBN 2000 menjadi 20 dolar AS per barrel memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp. 2,4 triliun. Jumlah itu tentunya akan lebih besar, jika harga minyak dapat lebih tinggi. Di pasar internasional, justru harga tersebut sudah mendekati angka 30 dolar AS per barrelnya. Pemerintah dengan sendirinya harus melakukan revisi APBN 2000 dengan mengubah berbagai asumsi yang dipakai sebelumnya.

Para ahli menilai, revisi dilakukan pemerintah jangan sampai terperangkap pada penggunaan yang tidak produktif. Tambahan dana ekstra itu, sebaiknya digunakan pada sektor yang mampu memberikan efek stimulasi ekonomi, bukan untuk subsidi. Bentuknya dapat berupa proyek padat karya pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat memprihatinkan terutama di berbagai daerah di luar Jawa.

Alokasi dana untuk subsidi BBM ini hanya akan menguntungkan Jawa. Sebab, pemakai BBM terbesar ada di Pulau Jawa. Jumlah mobil di Jakarta saja mungkin sudah mencapai 65 % dari seluruh jumlah mobil yang ada di Indonesia. Jadi, dengan pemanfaatan dana untuk subsidi sebenarnya daerah telah memberikan subsidi pada pusat. Pengorbanan itu, tentunya kurang signifikan, jika didekati dengan semangat otonomisasi yang sedang berdentung selama ini.

Memperhatikan rancangan APBN 2000 yang disusun pemerintah pusat sebenarnya terdapat "pelecehan" terhadap daerah secara konkret dan terlembaga. Riau sebagai penghasil minyak terbesar, hanya kebagian jatah sebesar Rp. 821 miliar. Bagi pejabat yang *rada memble* di Riau, jumlah itu dianggap fantastis. Namun, bila diamati apa yang seharusnya diterima oleh Riau, jumlah tersebut sangat menyakitkan hati nurani rakyat. Meningkatnya jumlah anggaran pembangunan untuk Riau memang perlu disyukuri. Namun, apabila peningkatan itu tidak pada proporsi yang seharusnya, tentunya Pemda dan masyarakat Riau harus dengan gigih mempertanyakan pada pemerintah pusat.

Alokasi dana pembangunan kabupaten/kota (DPKK) tahun anggaran 2000 terdiri atas dua kelompok, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum terdiri atas empat komponen. *Pertama*, dana perkapita sebesar Rp. 8.850 per kapita dengan dana minimum sebesar Rp. 2,0 miliar per kabupaten/kota. *Kedua*, dana menurut luas wilayah sebesar Rp 45.000 per KM². *Ketiga*, dana untuk kabupaten/kota kepulauan bernama dan

berpendhuni. *Keempat*, dana tambahan tingkat pendapatan dan potensi daerah.

Berdasarkan pendekatan perhitungan tadilah, maka dianggarkan oleh Bappenas dan Depkeu untuk Riau pada tahun 2000 mendatangke bagian jatah sebesar Rp. 821 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi alokasi dana umum kabupaten/kota sebesar Rp. 548.122.480 juta atau sebesar 66,75 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 272.877,952 juta, tinggal di provinsi/Dati I.

Persolannya sekarang adalah layak tidaknya Riau memperoleh anggaran sebesar itu, khususnya untuk dana alokasi umum ke kabupaten/kota? Dalam hubungan ini, contohnya dan yang diancarkan untuk Kepulauan Riau, Karimun, dan Natuna. Dalam pendekatan penghitungan yang digunakan Bappenas selain pendekatan penduduk dan luas wilayah, juga diadakan pendekatan jumlah pulau. Entah diperhitungkan atau tidak jumlah pulau yang ada di ketiga kabupaten tersebut, yang jelas dana alokasi umum yang diterimanya sangatlah minim.

Kabupaten Kepulauan Riau dalam rancangan APBN 2000, hanya mendapat dana alokasi umum sebesar Rp. 3.180.904 juta. Berarti hanya sebesar Rp. 1.180.904 juta tambahannya dari dana alokasi umum minimum (Rp. 2 miliar) yang seharusnya diterima oleh sebuah kabupaten. Kabupaten Karimun memperoleh jatah sebesar Rp. 2.378.900 juta, sehingga tambahannya dari dana minimum hanya sebesar Rp. 378.900 juta. Untuk kabupaten Natuna, DAUnya adalah sebesar Rp. 2.923, 981 juta, yang berarti hanya berlebih dari dana alokasi minimum sebesar Rp. 923,981 juta.

Dengan rancunya hasil perhitungan itu, seharusnya menimbulkan pertanyaan mendasar bagi pihak Pemda Riau dan Pemda kabupaten di seluruh Riau? Dana yang dikeluarkan atas kondisi geografis pendekatan perhitungan yang digunakan Bappenas untuk setiap pulau yang berpenghuni adalah sebesar Rp. 8.800 ribu. Model ini, akan menjadi aneh apabila Riau yang bertebaran pulau-pulaunya mendapat dana yang demikian kecil. Belum lagi, jika dilihat keadaan daerah Riau yang sangat memerlukan perhatian pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM-nya.

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, sesuai hasil perhitungan yang dikeluarkan Bappenas tersebut, tampak makin rancu lagi. Dalam ancangan APBN 2000, penerimaan Migas diperkirakan mencapai Rp. 30.319,0 miliar dan Pajak Penghasila Migas sebesar Rp. 8.829,6 miliar.

Secara keseluruhan, dari dua komponen itu saja, jumlahnya mencapai Rp.39.148,6 miliar. Bila diasumsikan hasil minyak itu berasal dari Riau sebesar 60 persen, maka dana yang seharusnya dikucurkan ke Riau dari sektor Migas saja sudah mencapai $15\% \times 60\% \times \text{Rp}39.148,6 \text{ miliar} = \text{Rp. } 3.523,374 \text{ miliar}$.

Dari perhitungan itu saja, jadi dana pembangunan sebesar Rp. 821 miliar (DAU + DAK) hanyalah sebesar 23,30 persen dari dana pengembalian hasil Migas yang seharusnya diterima Riau. Seandainya penerimaan lain yang termasuk ke dalam dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang seharusnya diterima Riau berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999, maka pre sentasenya akan semakin kecil. Sangat disayangkan sekali ketika otonomisasi didengungkan

dan pemerintah pusat berkoar-koar akan melaksanakannya pada bulan April 2000, justru APBN 2000 telah melecehkan marwah otonomi terhadap provinsi Riau.

Mencermati adanya kenaikan penerimaan minyak dalam APBN 2000 akibat meningkatnya harga, masyarakat Riau harus menyatukan kembali langkah bersama untuk memperjuangkan tambahan rezeki itu agar menetes ke Riau. Tambahan penerimaan RAPBN 2000 itu, akibat diubahnya asumsi harga minyak dari 18 dolar AS menjadi 20 dolar AS adalah sebesar Rp. 2,4 triliun. Dengan mamakai asumsi bahwa minyak Riau menyumbang 60%, maka layak kiranya Riau mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikannya ke Riau sebesar $15\% \times 60\% \times \text{Rp. } 2,4 \text{ triliun} = \text{Rp. } 216 \text{ miliar}$.

Dana tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Riau dengan pendekatan pembangunan padat karya. Pembangunan infrastruktur ini, harus diarahkan ke pedesaan, sehingga diperoleh dua manfaat sekaligus. Yakni terbukanya isolasi desa dan adanya lapangan pekerjaan tambahan bagi pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Perbaikan jalan desa akan membawa dampak bagi tergalinya potensi desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, setiap pemerintah kabupaten harus secara dini membuat profil masing-masing wilayah kecamatannya sampai tingkat desa. Data ini sangat diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan dengan pendekatan perwilayahan. Profil tersebut tidak hanya berisi ketersediaan SDA, tetapi juga berbagai kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.***

IMS-GT dan RIAU: Sebuah Perkawinan tak Seimbang

BERBICARA tentang arus globalisasi, memang membutuhkan kajian dari berbagai aspek. Dalam kerangka ekonomi era globalisasi, yang diimplementasikan melalui berbagai kerjasama regional maupun internasional (IMS-GT, AFTA, APEC, dll), sebenarnya berawal dari keinginan negara-negara industri baru dan berkembang untuk melepaskan diri dari cengkraman proteksionisme negara-negara maju Eropa dan Amerika.

Banyak sekali permainan politik yang diterapkan negara-negara maju untuk menghambat perkembangan negara-negara industri baru dan negara berkembang itu sendiri. Dihembuskannya isu HAM dan pengetatan melalui berbagai standar-standar kualitas merupakan cara-cara yang sangat sistematis dan strategis oleh negara-negara maju di Eropa untuk menghambat dinamika negara berkembang.

Hal ini dapat terlaksana karena mereka sangat memahami bahwa penanganan masalah-masalah tersebut di

negara sedang berkembang (terutama Indonesia) masih sangat lemah.

Pada tahap selanjutnya dengan keberhasilan membentuk kerjasama ekonomi sebagai konsekuensi era globalisasi, negara sedang berkembang dihadapkan pada dilema yang justru semakin pelik. Mereka harus memacu kerjasama teknologi dan standar kualitas yang menyamai industri-industri negara maju. Keadaan ini menuntut keberadaan *skill* dan tingkat kewirausahaan yang tinggi dan aset uang paling unik, yakni sumberdaya manusia (SDM).

Era globalisasi menjadi "*pedang bermata dua*" yang siap memangkas negara-negara yang sedang berkembang. Pada suatu sisi hasil-hasil produksi mereka tetap saja sulit memasuki pasaran ekspor akibat keterbatasan kualitas sesuai standar internasional, dan di lain sisi mereka harus menghadapi pengusaha mereka, yang sangat tidak efisien dan inovatif, dengan pengusaha-pengusaha dari industri maju dalam pasar domestik.

Satu-satunya jalan adalah dengan mengadakan aliansi kerjasama yang saling menguntungkan. Celakanya, untuk suatu kerjasama senantiasa dihadapkan pada suatu negosiasi dengan mengemukakan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh adalah pada saat Kadin Riau menyampaikan proposal kerjasama dalam rangka IMS-GT beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

Berbagai keunggulan yang dapat ditonjolkan Riau adalah tersedianya sumberdaya alam (SDM) yang cukup untuk dikelola. Tentu saja dalam hal manajemen usaha, *skill*, uang, teknologi dan birokrasi mereka masih sangat lemah. Jadi, kalau diibaratkan Riau sebagai seorang gadis, maka

Riau adalah seorang gadis yang mulus dan montok, sehingga sangat mengundang selera. Tetapi sayang, ia seorang yang masih bodoh, kurang mampu memanfaatkan potensi dirinya dan masih dibalut oleh tatakrama yang sangat mengungkung.

Celakanya lagi, ia tidak punya uang untuk membiayai berbagai keperluan untuk mengangkat derajatnya. Dapat dibandingkan jika ingin disandingkan dengan lelaki gagah perkasa, pintar dan banyak uang, maka satu kata saja yang dapat diucapkan oleh gadis cantik dan harum tadi: "Persuntinglah saya asal bisa ikut denganmu dan terserah apa maumu!"

Masalah mendasar apa sebenarnya yang melekat sehingga Riau khususnya dan bahkan Indonesia pada umumnya terperangkap pada posisi demikian? Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya semua itu bersumber dari pemerataan ekonomi yang tidak seimbang, baik antar wilayah, antar sektor dan yang paling keji adalah antar pelaku ekonomi. Sumber penyebabnya adalah sentralisasi kekuasaan dan lahirnya berbagai peraturan yang tidak memihak pada rakyat banyak dan bahkan bertentangan dengan nafas UUD 1945.

Inefisiensi yang muncul dari perilaku para pemburu rente yang mendapat fasilitas pemerintah (berkat kontribusinya pada pemilu dan pemilihan kepala-kepala daerah) menyebabkan terkendalanya pengembangan mutu dan kewirausahaan masyarakat secara massal dan alami (sesuai dengan mekanisme ekonomi yang sesungguhnya).

Masalah lain yang perlu pemikiran yang mendalam adalah rekayasa sosial masyarakat. Selama ini jarang sekali

ada di provinsi Riau bagaimana masyarakat dapat diarahkan kehidupan sosial masyarakatnya, agar tetap bertahan pada norma-norma dan landasan Pancasila, meskipun mereka beralih dari era ketertutupan ke arah era globalisasi yang penuh keterbukaan, transformasi yang sangat deras dan percepatan teknologi yang pesat.

Justru yang mampu memanfaatkan kondisi transisi masyarakat tersebut adalah pemburu rente yang telah menikmati akumulasi modal yang demikian lamanya.

Berbekal kemampuan akses ke berbagai lini birokrasi mereka mengalihkan ke arah transisi masyarakat tadi ke kondisi konsumtif dan terperangkap pada sistem yang penuh ketergantungan. Baik ketergantungan pada aparat birokrasi, yang didukung oleh sistem peradilan yang “aneh,” maupun ketergantungan ekonomi (dalam hal pemenuhan kebutuhannya) pada pemburu rente.

Globalisasi merupakan peluang, jika memang kita bisa terpacu dengan orang yang terlibat dalam percaturan. Tantangan yang dihadapi dengan sendirinya juga terbentang luas justru permukaannya lebih luas dari peluang tersebut. Untuk melewati peluang dan rintangan yang diperlukan adalah kemampuan memanfaatkan kekuatan dan kemauan mengatasi kendala yang masih melekat.

Secara umum langkah yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah menindaklanjuti dan menyempurnakan kembali paket deregulasi 23 Mei 1995 ke arah yang lebih konkrit. Sasaran pokoknya adalah memangkas pengaturan tata niaga berbagai komoditas strategis yang melahirkan undang-undang anti monopoli.

Sudah saatnyalah kita membuka diri untuk kita sendiri

sebelum membuka diri terhadap bangsa lain. Sebagai proses pembelajaran bagi provinsi Riau khususnya dalam menghadapi IMS-GT dan APEC sangat dibutuhkan suatu keberanian pemerintah daerah untuk secara nyata dan tegas mengkaitkan keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerahnya dengan berbagai proyek pembangunan yang berskala besar baik oleh pemerintah maupun swasta.

Untuk itu diperlukan adanya pemantapan strategis global pembangunan dengan mengembangkan *strategic business unit* (lini birokrasinya) ke arah yang lebih efisien dan produktif. Sangat disayangkan kiranya, jika masih banyak kalangan dinas instansi, yang terkait langsung dengan pengembangan kewirausahaan masyarakat, jangankan untuk memahami apa itu IMS-GT mengenalnya saja pun belum.

Upaya lainnya adalah menyusun suatu strategi transformasi masyarakat dari kondisi yang serba terisolasi ke arah kondisi keterbukaan dan globalisasi. Untuk itu diperlukan adanya rekayasa sosial yang valid dan komprehensif dari segala aspek kehidupan masyarakat Riau yang multi ras dan *multi purpose*.

Dalam hal ini, peran aliansi antara Pemda dan Perguruan Tinggi (PT) sangat menentukan. Mungkin Riau dapat mencontoh bagaimana provinsi Daerah Istimewa Aceh mengembangkan kebijakan pembangunan di daerahnya dengan membentuk tim ahli yang solid di samping gubernurnya.

Selanjutnya, implementasi program pengembangan SDM harus digalakkan dan diperluas meskipun membutuhkan investasi yang relatif besar. Khusus untuk membina SDM di kalangan pengusaha kecil sekaligus

mengeskalasi skala usahanya, sudah saatnyalah di tiap daerah tingkat II (kabupaten) dikembangkan melalui suatu lembaga yang disebut dengan Bisnis Inkubator sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Usaha Kecil dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil.

Suatu studi kelayakan intensif yang menyangkut pendirian Bisnis Inkubator di setiap daerah tingkat II dengan berpedoman pada stratifikasi produk unggul yang dimiliki mutlak diperlukan.***

Investasi Riset

GERAK roda perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh
/xy/ variabel utama, yaitu konsumsi, investasi dan ekspor
/xy/ variabel ini pada dasarnya juga saling mempengaruhi
satu sama lain. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi lapangan
pekerjaan dan memberi kesempatan masyarakat untuk
meningkatkan pendapatannya. Kebijakan moneter akan membatasi
jumlah pendapatan dan untuk membatasi kebutuhan
konsumen akan naik se-tan dengan naiknya pendapatan
masyarakat.

Bedanya halnya dengan konsumsi. Jika konsumen pada
lapangan akan variabel tersebut akan rendah dan masyarakat
kepercayaan akan berkurang. Selain positif. Masyarakat akan
memiliki ketertarikan melakukan konsumsi yang
kemungkinan pendapatan mereka. Kemudian jika
menyebabkan daya beli masyarakatnya berkurang
/xy/ variabel ini akan mempengaruhi pendapatan dengan
/xy/ variabel ini akan rendah dan akan mempengaruhi

Krisis dan Keterpurukan Investasi Riau

GERAK roda perekonomian suatu negara ditopang oleh tiga variabel utama, yakni konsumsi, investasi dan ekspor. Ketiga variabel ini pada dasarnya juga saling mempengaruhi satu sama lain. Kenaikan investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, mereka membelanjakan pendapatan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi akan naik sejalan dengan naiknya pendapatan masyarakat.

Berbeda halnya dengan konsumsi. Ekonomi hanya ditopang oleh variabel industri akan rentan dan memiliki keterbatasan untuk berputar secara positif. Masyarakat akan memiliki keterbatasan melakukan konsumsi sesuai kemampuan pendapatan mereka. Kenaikan inflasi menyebabkan daya beli mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dengan sendirinya mengalami kemandekan sebatas kemampuan atau

daya beli masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi selama ini menyebabkan investasi menjadi turun dan ekonomi berputar hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Di Riau, keterpurukan investasi akibat krisis sesuai data yang dikeluarkan BPS, sangat jelas sekali. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) meskipun mengalami kenaikan, namun itu terjadi hanya adanya peningkatan investasi pada sektor bisnis tertentu. Sedangkan di sektor lain umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 1995 (sebelum krisis) total PMDN di Riau Rp. 4.669.466,24 juta dan tahun 1998 (setelah krisis) naik menjadi Rp. 4.991.737,03 juta atau 6,9 persen.

Kenaikan itu terjadi akibat adanya peningkatan investasi di bidang industri kertas yang mencapai 110,75 persen, pertambangan 26,36 persen, dan perhotelan 22,43 persen. Sedangkan sektor-sektor yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat mengalami penurunan seperti industri makanan yang mengalami penurunan mencapai 14,97 persen, perkebunan anjlok menjadi 90,23 persen dan industri lainnya turun sebesar 12,71 persen.

Baik sebelum maupun sesudah krisis kontribusi investasi terbesar di Riau adalah pada sektor bisnis industri kertas. Pada tahun 1995 *sharing* industri kertas terhadap total investasi PMDN Riau adalah 38,44 persen, diikuti perkebunan sebesar 23,57 persen, dan kehutanan 8,74 persen serta industri kayu 6,25 persen. Jika diperhatikan pola investasi tersebut di Riau ternyata lebih terfokus pada industri di sektor kehutanan. Pada dasarnya tidak banyak masyarakat yang mampu menikmati bisnis ini kecuali konglomerat dan BUMN yang memperoleh hak-hak khusus dari

pemerintah. Sedangkan setelah krisis, tahun 1998, kontribusi industri ini makin dominan. Industri kertas mencapai 75,79 persen dan industri kayu sebesar 5,16 persen. Sedangkan perkebunan sebesar 2,15 persen, industri makanan 5,64 persen.

Keadaan sama juga terjadi dengan penanaman modal asing (PMA). Kontribusi terbesar PMA sebelum krisis adalah pada sektor industri kertas yang mencapai 87,41 persen atau 1971,42 dolar AS. Hanya saja setelah krisis ekonomi terjadi investasi sektor ini terkoreksi mencapai 90,73 persen sehingga tahun 1998 investasinya hanya sebesar 182,68 juta dolar AS. Kontribusinya pada total investasi PMA Riau tinggal 13,25 persen. Kontribusi terbesar terdapat pada industri jasa lainnya yang mencapai 64,75 persen.

Kenyataan ini menjadi menarik untuk disimak mengingat pergeseran ke industri jasa biasanya mencerminkan adanya perbaikan struktur ekonomi yang bersifat subsistem ke arah sektor modern. Keadaan di Riau tentunya tidak seperti itu. Setelah krisis ekonomi terjadi, PMA di Riau terkoreksi mencapai 38,86 persen. Pada tahun 1995 total PMA adalah 2,255.41 juta dolar AS. Sedangkan tahun 1998 hanya tinggal 1,379, 02 juta dolar AS. Artinya pergeseran struktur ekonomi Riau dari sudut investasi PMA terjadi karena menyusutnya investasi pada sektor primer lebih besar dari sektor sekunder dan tertier. Sektor perkebunan kontribusi PMA pada tahun 1998 sebesar 5,35 persen dan ini mengalami peningkatan sebesar 35,41 persen.

Gambaran data menunjukkan arahan pengembangan investasi di Riau belum memiliki kait-kelindan yang jelas

dengan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembangunan Riau yang dicanangkan gubernur. Bila investasi PMDN hanya terfokus pada industri padat modal dan tidak dekat dengan pengembangan mata pencaharian masyarakat banyak maka kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin kecil adanya.

Selain itu agresivitas PMA untuk merambah peluang bisnis sektor ketiga harus diantisipasi melalui penerapan pola keterkaitan yang tegas. Artinya investor asing yang akan mengembangkan usahanya di Riau harus mencari *partner* pengusaha Riau sebagai upaya pemberdayaan dan perluasan kesempatan berusaha. Bila tidak demikian maka yang akan muncul adalah *saving gap*. Ini akan sangat merugikan Riau pada dua sisi, yakni berkembangnya pengusaha tempatan dan di sisi lain adalah terhentinya akumulasi investasi pada kawasan ini.

Selanjutnya dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di depan DPRD Riau telah ditunjukkan pula gambaran persetujuan investasi PMA dan PMDN di Riau pada tahun 1999. Penanaman modal dalam negeri yang telah mendapat persetujuan adalah 26 proyek dengan nilai Rp. 9,94 triliun. Keadaan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 1998 mencapai 97,35 persen. Sedangkan PMA yang mendapat persetujuan pada tahun 1999 ini mencapai 83 proyek dengan nilai 4,41 dolar, atau naik secara fantastis sebesar 269,09 persen.

Meskipun tidak diperoleh gambaran sektor apa saja yang mendapat limpahan persetujuan investasi tersebut, namun dari kenaikan fantastis itu sudah dapat dipertanyakan

Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (1)

(Mencermati “Deklarasi Bali”)

KESENJANGAN ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini semakin menjadi topik yang hangat dibahas para ahli. Keadaan tersebut timbul karena akibat semakin lebarnya jurang kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan sampainya pada muara yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Ketidakpuasan sebagian besar masyarakat sebagai akibat dari pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan dapat menjadi pemicu yang menimbulkan kerawanan kehidupan berbangsa yang harmonis, sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Realita kehidupan ekonomi masyarakat dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang sudah terlampaui monopolistik. Pengusaha kelas “kakap” telah merambah dan menguasai semua sektor usaha, sehingga lapangan usaha yang tersisa bagi sebagian besar pengusaha kecil sangat sempit. Liem Sioe Liong sendiri sebagai salah seorang In-

donesia, sampai tidak lagi mengetahui sudah berapa banyak perusahaan yang dimilikinya, di bawah naungan Salim Group. Berbagai sumber menyatakan jumlahnya mencapai 600 perusahaan, dan setiap bulannya diperkirakan bertambah 10 perusahaan.

Agar kesenjangan sosial, dapat akibat pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, yang secara stimultan berpadanan pula dengan masih lemahnya kepastian hukum dan semakin dekatnya memasuki era persaingan menuju pasar bebas, sangat dibutuhkan penanganan yang serius dan seksama dari berbagai pihak. Penanganannya harus benar-benar konkrit dan terpadu. Bukan sekedar *lips service* atau slogan-slogan politik yang tidak tampak jelas dalam prakteknya.

Deklarasi Bali

Menanggapi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini para pengusaha kondang Indonesia melahirkan suatu deklarasi yang cukup menarik. Ada kiranya hal-hal yang perlu dicermati dari deklarasi yang lahir setelah para konglomerat tersebut mengikuti sarasehan P4. Secara substansi sebenarnya ketujuh poin isi deklarasi tersebut bukanlah sesuatu yang baru jika ditinjau dari aspek upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia menjadi pengusaha unggul yang tangguh.

Butir pertama sampai dengan butir ketujuh yang termaktub dalam Deklarasi Bali tersebut tidak lebih dari pengulangan makna dari isi GBHN dan Repelita IV. Hanya redaksinya saja yang berbeda. Namun itu mungkin dimaksudkan sebagai pengejawantahan dari makna GBHN

dan Repelita tersebut. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa dan kerangka kerja yang bagaimana sebagai implementasinya? Artinya, tanpa deklarasi seperti itu pun para konglomerat (dan seluruh rakyat Indonesia) sudah diwajibkan melandaskan seluruh kegiatan dan tingkah laku berbangsa dan bernegaranya sesuai dengan GBHN dan Repelita IV tersebut. Tinggal lagi pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu dan kelompok masyarakat. "Ril"nya yang pasti sudah diputuskan oleh wakil-wakil rakyat di MPR.

Jadi, jika saja konglomerat tersebut menyepakati kembali apa yang telah digariskan oleh GBHN dan Repelita IV mungkin saja mereka ingin mendapat legitimasi baru dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, bahwa sebenarnya mereka sangat *concern* terhadap cita-cita dan perjuangan bangsa dan negara, meskipun pada prakteknya mereka di lapangan mereka berada pada kutub yang sangat diuntungkan oleh proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini. Dengan demikian, manfaatnya terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah belum dapat dirasakan sama sekali.

Bagaimanapun terdapat dua butir dari isi deklarasi tersebut yang langsung menyentuh pada aspek pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kedua butir tersebut adalah butir keenam (menekankan pada pola kemitraan usaha dan mengerem laju pemburu rente) dan butir ketujuh (meningkatkan pada akses usaha kecil dan menengah, baik terhadap modal, kualitas SDM dan informasi). Lazimnya sebuah deklarasi, memang tidak berbentuk program tindakan, karena suatu deklarasi hanya

mengandung arti bahwa secara bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya menyepakati sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Oleh karenanya, jika butir keenam dan butir ketujuh memang ditindaklanjuti dengan program yang nyata dan konkrit maka implikasinya jelas akan memberikan manfaat yang benar.

Sayangnya dalam deklarasi tersebut juga terdapat satu butir, yakni butir kelima yang tidak saja dapat ditinjau sebagai unjuk kekuatan, tetapi kalau boleh dikatakan sedikit mengurangi eksistensi kelembagaan Kadin. Terlalu kasar memang jika menganggap substansi dari butir kelima deklarasi tersebut sebagai "pelecehan" terhadap Kadin. Dikatakan sebagai kekuatan karena pada dasarnya butir kelima tersebut seakan memaksa pemerintah melakukan dialog rutin dengan para pengusaha. Di sini seolah-olah selama ini tidak terjadi adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kepentingan pengusaha sebagai pelaku ekonomi yang memiliki peranan atau porsi yang makin besar dalam menopang laju pertumbuhan pembangunan.

"Tamparan" terhadap Kadin terlihat dari fungsi forum yang ingin dibentuk dalam butir kelima deklarasi tersebut. Maksudnya sangat dalam karena fungsi forum tersebut tidak saja membahas forum yang dihadapi, tetapi juga merumuskan langkah antisipasi dalam menentukan kebijakan ekonomi yang lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dunia usaha serta seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, itulah yang seharusnya menjadi misi Kadin, yakni menjadi jembatan dan

memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan yang diambil pemerintah dalam bentuk pemikiran yang konstruktif.

Jadi, sangat aneh kiranya jika dalam butir kelima tersebut tidak disinggung sedikitpun peranan Kadin sebagai media yang akan mengakomodir para pengusaha dan membentuk program dialog tersebut. Bila dicermati lebih mendalam lagi, butir kelima, Deklarasi Bali seakan menimbulkan suatu pertanyaan yang cukup menyangat: “Apakah DPR, Presiden melalui kabinet VI dan seluruh jajaran birokrasi pemerintah selama ini memang tidak berhasil atau mampu merumuskan dan mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menentukan kebijakan ekonomi yang lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dunia usaha dan seluruh rakyat Indonesia?”

Untuk menjawab berbagai fenomena yang lahir dari ditelorkannya Deklarasi Bali seperti yang diuraikan di atas sangat tergantung dari antisipasi dan langkah-langkah berbagai pihak dalam menindaklanjutinya, tidak saja oleh para konglomerat yang menandatangani, tetapi juga oleh pemerintah, dan terutama sekali Kadin sebagai wadah yang diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan para pelaku ekonomi di Indonesia menuju pada struktur ekonomi yang adil dan saling menguntungkan.***

Catatan Kecil untuk

Kadinda Riau (2)

(Bercermin pada “Kesepakatan Adelaide”)

Konferensi Adelaide

UPAYA pemberdayaan pengusaha kecil ternyata tidak hanya menjadi kerja besar bangsa Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi dengan berlakunya persetujuan APEC memaksa negara-negara Asia-Pasifik untuk semakin memusatkan perhatian guna memberdayakan pengusaha kecilnya. Konferensi para menteri negara-negara Asia-Pasifik yang tergabung dalam APEC dengan melibatkan 700 pengusaha kecil, pada tanggal 12-15 September 1995 di Adelaide, Australia, berhasil menyepakati beberapa hal pokok yang sangat berkait dengan upaya dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menolong pengusaha kecil menuju era globalisasi.

Selama ini pengusaha kecil sering kalah bersaing di pasar bebas, karena persoalan modal dan rendahnya kualitas SDM. Padahal peranannya selama ini cukup besar dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri terdiri dari 70

persen ekspor komoditi non-migas 40 persen diantaranya dihasilkan oleh pengusaha kecil, meskipun nilai tambahnya tidak sepenuhnya dinikmati pengusaha kecil tersebut.

Isu yang dikembangkan pada Konferensi Adelaide ini menyangkut; pembentukan “bapak angkat” dan penyatuan dana untuk menangani masalah pemasaran, pelatihan dan pengembangan produk pengusaha kecil. Disamping itu, direkomendasikan pula pemanfaatan sarana internet yang berbiaya murah (meskipun tidak banyak pengusaha yang dapat menggunakannya, terutama di Indonesia).

Bila hasil Konferensi Adelaide, yang akan diusulkan dalam pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang nantinya dapat diterima dan diimplementasikan menjadi program yang konkret, maka suatu peluang dan tantangan yang besar akan “menganga” lebar dihadapan pengusaha kecil. Bagi Indonesia, program bapak angkat sudah lama diterapkan. Tinggal lagi bagaimana menyempurnakannya dalam bentuk mekanisme kerja yang saling menguntungkan “bapaknya” dari pada “anak asuhnya.”

Menyangkut penyatuan dana untuk kepentingan penanganan masalah pemasaran, pemodalán dan pengembangan kualitas SDM juga sudah diarsir di Indonesia. Melalui pemanfaatan dana BUMN, Indonesia telah mencoba menerapkan bagaimana mengakomodasikan sumber-sumber dana yang dapat diarahkan pada pemberdayaan usaha kecil tersebut.

Pelaksanaannya dan sistem penanganannya memang masih dapat dikatakan sangat sembraut dan parsial program. Jika hal tersebut disempurnakan lagi, maka hasilnya jelas akan sangat membantu usaha kecil, dan dapat secara

cepat mengantisipasi hasil Konferensi Adelaide. Di provinsi Riau misalnya, akibat pengetahuan para pengusaha tentang cara-cara memperoleh dana tersebut sangat minim, dan birokrasi dalam pemanfaatannyapun sangat berbelit-belit, maka dana BUMN yang mencapai Rp. 5,7 miliar baru dapat tersalurkan lebih kurang 10 persen. Bila pengusaha kecil yang akan dibina itu di desa Terkulai Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk memperoleh bantuan dana BUMN harus meminta rekomendasi dari Jakarta melalui direksi BUMN, maka sebelum dana bantuan disetujui saja, pengusaha tersebut sudah keburu tergilas oleh dinamika bisnis yang memang kurang memihak kepadanya.

Momentum untuk Kadinda Riau

Beberapa hari lalu Kadinda Riau baru saja melaksanakan rapat kerja. Apa hasil yang diperoleh dari rapat kerja tersebut jelas banyak pihak yang belum mengetahuinya, baik para pengusaha yang punya kepentingan besar dengan lembaga tersebut maupun pihak-pihak lain yang ingin terlibat secara bersama memikirkan pemberdayaan pengusaha Riau, khususnya pengusaha kecil dan menengah (UKM). Berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, jang-an-jangan Rakerda itu sendiri juga tidak memahami apa hasil yang telah dicetuskan bila kehadirannya dalam Rakerda hanya sebagai peserta yang 4D (duduk, diam, dengar, dan duit).

Hal yang lebih banyak terseruak di media massa berkenaan dengan Kadinda Riau akhir-akhir ini mengarah pada kepentingan orang per orang. Bahkan sempat muncul pendapat-pendapat tentang lemahnya eksistensi manusia-

manusia yang ada dalam kepengurusan Kadinda Riau sekarang. Sampai secara rutin membayar iuran, tapi tidak memperoleh apa-apa dari lembaga tersebut. Jika dinilai secara sederhana, ocehan para pengusaha tersebut tidak lebih dari omelan *'seorang anak kecil yang minta jajan pada kakeknya.'*

Sempena dengan dilaksanakannya Deklarasi Bali dan Konferensi Adelaide, sambil menunggu hasil-hasilnya di lapangan, maka sudah sewajarnya para pengusaha Riau mulai berfikir untuk mengantisipasinya menjadi tugas Kadinda Riau untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam program-program kerja yang berkualitas dan kompetitif. Momentum yang ada tersebut harus dijadikan landasan berpijak, dirangkum dengan kondisi struktur ekonomi dan dinamika bisnis yang terjadi saat ini, dalam menyusun strategi di masa mendatang.

Ada dua peluang yang kiranya dapat dijadikan "sasaran tembak" program Kadinda Riau berkenaan dengan lahirnya Deklarasi Bali dan Konferensi Adelaide. *Pertama*, terbukanya akses untuk mendapatkan dana bagi pengusaha guna pengembangan SDM, teknologi dan pemodalannya, baik dari dalam (Deklarasi Bali) maupun luar negeri (Konferensi Adelaide) yang mungkin saja diimplementasikan dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah.

Kedua, peluang untuk mengembangkan kemitraan usaha yang makin luas dan saling menguntungkan. Melalui pembentukan jaringan usaha yang terpadu dapat diharapkan adanya kegiatan usaha yang saling berkait dengan prinsip-prinsip yang adil dan bertanggung jawab.

Tantangan bagi Kadinda Riau, tentunya tidak kecil pula. Pada butir ke 7 (tujuh) Deklarasi Bali dituliskan satu kalimat yang berbunyi: “.....*harus dihindari pemanjaan usaha kecil yang justru bisa melemahkan semangat kewirausahaan mereka*”. Pernyataan ini kiranya menjadi tugas besar Kadinda Riau agar mampu mengangkat kualitas pelaku-pelaku ekonomi Riau. Tantangan lain adalah menentukan cara-cara dan sistem, serta mekanisme menangkap peluang tersebut dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di provinsi ini. Upaya untuk mengerem pemburu-pemburu rente yang datang dari luar dengan kemampuan *lobby* dan *power* yang tinggi, perlu kiranya dicarikan jalan keluarnya. Termasuk pula untuk memperbaiki struktur pasar yang makin memonopolistik dan mempertanyakan “koperasi-koperasi tameng,” yang cenderung menguasai jaringan distribusi produk-produk dan usaha-usaha jasa tertentu.

Kesimpulan

Perkembangan usaha nasional dewasa ini sudah makin monopolistik sebagai akibat pembangunan ekonomi yang terlalu menekankan pertumbuhan. Pengusaha kelas kakap menguasai hampir semua sektor usaha. Kondisi demikian juga terjadi di provinsi Riau. Bila tidak ditangani serius, baik oleh pemerintah maupun segenap masyarakat Indonesia, maka kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akan semakin parah dan diperkirakan dapat mengancam stabilitas nasional.

Upaya untuk menanganinya adalah dengan menumbuhkan dan memperkuat pengusaha menengah yang unggul, sehingga perekonomian nasional tidak rentan

terhadap gejolak dan dinamika era perdagangan bebas. Caranya adalah melalui komitmen dan tindakan yang konsisten dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan menghapus praktik-praktik monopoli, oligopoli dan kartel, serta pengaturan tata niaga yang tidak memihak pada perbaikan ekonomi rakyat.

Deklarasi Bali dapat saja dinilai sebagai suatu kesadaran baru dari para konglomerat untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama melalui eksistensi Kadin yang kokoh dan antisipasi terhadap dinamika bisnis di masa mendatang.

Sementara Kesepakatan Adelaide jika dapat disetujui dalam pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang merupakan peluang emas untuk mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan secara internasional, termasuk akses terhadap dana yang lebih luas untuk pengembangan modal, teknologi dan perbaikan kualitas SDM.

Aspek-aspek tersebut di atas harus lebih dicermati oleh Kadinda Riau menghadapi Musda mendatang. Rumusan strategi yang tepat dan implementasi programnya harus mengarah pada upaya menangkap peluang-peluang tersebut dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pengusaha Riau untuk meng-antisipasinya. Jadi, bukan hanya mempertengahkan siapa yang duduk dan akan duduk di kepengurusan, apalagi menjadi balita yang biasanya cuma "merengek".***

Signifikansi Embargo Ekonomi Riau

RENCANA memberikan reaksi atas pernyataan presiden Gus Dur melalui blokade hasil bumi Riau merupakan embargo ekonomi rakyat Riau terhadap pusat. Ditinjau dari aspek sejarah, alasan kuat untuk dilaksanakannya embargo ekonomi adalah makna kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Riau. Sejak proklamasi kemerdekaan, beberapa kerajaan di Riau mengakui kedaulatan pemerintah pusat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan, secara bersamaan pula, diakui telah terjadi “penjarahan” maupun eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah ini melalui tameng “pemerataan pembangunan” dan “untuk kepentingan rakyat banyak”. Kondisi ini merupakan *elegi singkong dan keju*, sebuah wilayah yang kaya akan SDA (*keju*) dikuras habis, sementara masyarakatnya hanya dijatahi *singkong* untuk mengisi kehidupannya.

Banyak sekali kebijakan yang dipaksakan pemerintah pusat NKRI dan amat berseberangan dengan kepentingan

pemberdayaan masyarakat di Riau. Kerusuhan yang terjadi di Lagoi, Pulau Bintan adalah refleksi dari kesewenang-wenangan penguasa selama ini dalam mengukur arti kemerdekaan dan nilai eksistensi masyarakat dalam sebuah wadah NKRI.

Demikian pula dengan kasus Torganda, Bagan Batu, dan yang paling dominan adalah berdiri megahnya berbagai perusahaan minyak, kayu, pasir, dll, adalah sebagai lambang kekuasaan dan penghisapan darah kehidupan rakyat Riau oleh pemerintah pusat NKRI.

Dalam aspek kekinian, setelah reformasi bergulir, dalam kacamata banyak orang, setelah diperoleh pemerintahan yang demokratis, ceritanya masih tidak berbeda. Harapan yang disangkutkan rakyat Riau pada pemerintahan Gus dur, tampaknya hanya jadi bahan lawakan belaka. Setelah janji muluk pembagian 75 persn pembagian hasil SDA, kini hati rakyat Riau diluluh-lantakkan oleh caci maki dan ketidakconsistenan sikap presiden itu sendiri. Pelecehan presiden Gus Dur yang menyatakan "Riau tidak ada apa-apanya", merupakan pola kepemimpinan dan sitem kekuasaan pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimainkan oleh rezim sebelumnya.

Riau dan RAPBN 2000

Cermin konkritnya, dapat dibaca dari RAPBN 2000 yang diajukan pemerintah Gus Dur terhadap DPR. Disamping terlihat konservatif, RAPBN 2000 juga sangat tidak akomodatif terhadap terlaksananya otonomi daerah. Dari 64 persen porsi daerah masih diboncengi oleh program sektoral yang "bau" sentralisasinya amat dominan.

Wajah pengurusan SDA sangat kentara pula dalam RAPBN tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh masuknya para investor. Kompensasi bagi para investor ini, selain kemudahan dalam mendirikan usaha dan proses bisnis adalah diberinya mereka kesempatan untuk mengelola SDA secara tidak wajar. Para pemburu rente tidak akan begitu saja menanamkan uangnya, tanpa melihat adanya peluang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat.

Periode waktu jangka pendek ini, diambil mengingat situasi politik di Indonesia ke depan belum dapat diprediksi secara baik. Konsekuensinya, bila investasi dalam mengolah SDA ingin kembali dengan cepat, haruslah dengan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kenyataan itu, ditunjang pula oleh besarnya beban bunga utang maupun cicilannya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang luar negeri dalam RAPBN 2000 mencapai 32,13 persen, yakni Rp. 58,989 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dalam negeri dalam rangka rekapitulasi adalah Rp. 42,364 triliun, sehingga total pembayaran utang secara keseluruhan akan mencapai Rp. 101,353 triliun atau 55,20 persen.

Pinjaman baru sebesar Rp. 23,184 triliun hanya akan menutupi 22,88 persen beban utang. Untuk itu, selanjutnya diperlukan penggalan sumber-sumber dalam negeri khususnya pajak. Dalam menggairahkan ekonomi, sangat diperlukan masuknya investasi dari para pemodal. Lemahnya institusi yang ada karena virus KKN yang masih bersarang kuat, menyebabkan birokrasi masih bersifat homogen dan tidak elastis. Keadaan ini, merupakan

kesempatan bagi pemburu rente untuk melakukan eksploitasi SDA dan SDM secara semena-mena. Riau dengan kekayaan SDA yang masih tersisa dan besarnya kelompok masyarakat dengan kualifikasi mutu yang masih rendah, akan menjadi sasaran empuk bagi pemburu rente untuk mengejanya atas nama investasi.

Menatap ke masa depan untuk mendapatkan titik cerah, dengan sistem yang ada sekarang, bagi Riau sulit diperoleh. Perkembangan ekonomi secara alamiah, justru akan dihadapi tantangan besar. Anjloknya harga TBS sebesar 21 persen menjadi hanya Rp. 300 merupakan masalah besar bagi perekonomian Riau. Daya beli masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari sektor perkebunan sawit, akan terkoreksi tajam.

Yang perlu diperhatikan adalah, jika kondisi itu menimbulkan kefrustasian, sementara pemerintah tidak mampu memberikan jalan pemecahannya, maka yang akan muncul adalah kerusuhan berantai. Ini dilandasi oleh sebuah kenyataan mengingat jumlah masyarakat petani sawit di Riau sangat besar dengan kualifikasi pendidikan yang rendah. Contoh yang sama dapat dilihat dari apa yang dialami oleh petani bawang di Brebes, Jawa Tengah, yang membuang bawang mereka di jalan raya, karena harga jual yang jauh di bawah biaya produksi.

Sementara sisi lainnya, akibat persaingan yang kian tajam, harga *plywood* di pasar internasional mengalami penurunan tajam. Pada mulanya, harga mencapai 400 dolar AS per meter kubik, kini hanya menjadi 300 dolar AS per meter kubik.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, para pengusaha

kiranya blokade hasil bumi Riau dalam bentuk embargo ekonomi rakyat Riau terhadap pemerintah pusat NKRI, merupakan jalan terbaik. Ini dimaksudkan, agar Riau punya kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Inilah kiranya yang perlu dipahami masyarakat Riau secara baik, khususnya bagi mereka yang dengan bangganya akan mengikuti kongres. Semoga.***

plywood dan perkayuan, tentunya harus melakukan efisiensi biaya produksi. Cara yang paling sering mereka tempuh adalah melakukan PHK atau pemotongan gaji para pegawai. Adalah upaya ini, konflik sangat potensial untuk menguak ke permukaan. Ini disebabkan jumlah buruh yang terkait dengan industri perkayuan di Riau cukup besar. Koreksi terhadap daya beli mereka signifikan bagi terkendalanya dinamika ekonomi di daerah ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh dalam mengantisipasi pembiayaan dalam negeri akan ditanggapi buruk oleh para pengusaha yang sejak masa krisis telah mengalami tekanan bisnis yang cukup keras. Tidak kecil kemungkinan, untuk daerah Riau justru yang akan terjadi adalah larinya modal ke luar negeri (*capital flight*), mengingat situasi investasi memang belum kondusif sambil menghindari beban pajak. Investasi yang diharapkan, memacu ekonomi hanya akan jadi impian belaka.

Harga minyak bumi yang kini melambung dan menjadi andalan pemerintah daerah, diperkirakan hanya akan bertahan selama enam bulan. Meskipun ada quota dalam pasar minyak internasional, Indonesia tentunya akan tetap memanfaatkan tenggang waktu enam bulan itu dengan meningkatkan produksi. Artinya, eksploitasi yang terhadap minyak akan meningkat dan cadangan untuk masa depan akan menipis. Riau dengan sendirinya akan sangat dirugikan oleh persoalan ini, karena minyak tidak dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sementara, ketika ada wewenang untuk mengelolanya cadangan minyak tidak lagi ekonomis bagi pemberdayaan rakyat Riau.

Mengacu pada berbagai persoalan yang telah diungkap,

Bagian Dua:

**Ekonomi Rakyat:
Pemberdayaan atau Penjarahan?**

Memberdayakan Ekonomi Rakyat

(Dalam Perspektif Adat Kuantan Singingi)

SELAMA ini secara ekonomi, rakyat merasa terkungkung dengan dua pilar yang sangat kokoh. *Pertama*, kekuatan birokrasi yang menciptakan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat. Rakyat berada pada posisi objek yang hanya layak untuk di eksploitisir. *Kedua*, kekuatan modal dari sebahagian kecil masyarakat yang berkooptasi dengan birokrasi. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber (modal, bahan mentah, dan informasi) seperti membentur tembok. Bahkan yang sering terjadi adalah perampasan hak rakyat yang pada akhirnya bermuara pada proses pemiskinan berulang dan kontinyu.

Kedepan, kondisi demikian seharusnya tidak terulang lagi. Proses pemberdayaan rakyat selanjutnya tergantung pada kesungguhan untuk menempatkan ulang (*repositioning*) masyarakat itu sendiri. Pola otonomi dan partisipatif yang dilandaskan kepada eksistensi masyarakat dimana ia berada akan sangat penting dan terkait dengan keragaman adat

istiadat yang dianut masyarakat tersebut. Rakyat Kuantan Singingi yang ingin membentuk kesatuan wilayah sendiri menjadi sebuah kabupaten, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyatnya harus mampu mengkristalisasikan keberadaan adat sebagai pilar utama. Pola dan model yang dikembangkan harus bermula dari keberadaan sosio-kultur masyarakat itu sendiri.

Visi dan Misi

Ke arah mana ekonomi rakyat Kuantan Singingi harus dibawa sudah tergambar sangat jelas. Visi ekonomi rakyat Kuantan Singingi dalam perspektif adat menyatakan; *Bumi sonang padi menjadi. Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak. Anakbua sonang sentosa. Bapak kayo Ondek berome. Mamak disomba urang pulo*. Dalam visi ini terdapat sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan. *Pertama*, sektor per-tanian dengan dua sub-sektor, yakni pertanian tanaman pangan dan peternakan (*Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak*). Ini berarti swasembada pangan menjadi arah utama kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. Latar belakangnya tentu dari kondisi alamnya yang sangat subur.

Kedua, sektor tenaga kerja yang secara sadar ditempatkan pada posisi *partner*. Dalam perspektif adat Kuantan Singingi tenaga kerja ditempatkan bukan hanya sebagai aset yang dieksploitisir, tetapi harus diberdayakan (*Anakbua sonang sentosa*). *Ketiga*, sektor keuangan dan investasi. Kemakmuran masyarakat harus ditopang oleh tersedianya modal dan aset ekonomi yang likuid. Kepemilikannya haruslah berada pada masyarakat itu sendiri,

sehingga ketergantungan dari pihak lain dapat diminimalkan (*Bapak kayo Ondek berome*). Perspektif ini juga dapat diartikan bahwa sektor pertambangan juga menjadi andalan. Ini diperkuat oleh tersedianya sumber-sumber pertambangan di Kuantan Singingi. Sudah sejak dulu masyarakat terlibat dalam mendulang emas untuk menambah penghasilan keluarga.

Keempat, sektor budaya sebagai pengikat dari perkembangan sektor lain. Pengembangan budaya di Kuantan Singingi memiliki arti ekonomi yang sangat penting. Pacu Jalur yang dilakukan selama ini merupakan atraksi budaya yang laku dijual sebagai komoditas pariwisata. Dalam kaca mata masyarakatnya, budaya merupakan alat yang sangat penting untuk menata kehidupan dan dinamika masyarakat. Karena itu, Ninik Mamak harus dikedepankan sebagai simbol kesejahteraan suatu komunitas (*Mamak disomba urang pulo*).

Upaya untuk mencapai visi tersebut oleh masyarakat Kuantan Singingi dituangkan ke dalam misi kegotongroyongan dan kekeluargaan yang sangat kental. Masyarakat dalam perspektif adatnya mengakui adanya kesamaan hak dan tanggung jawab dalam mengemban kesejahteraan bersama sebagaimana disebutkan; *Ke bukik samo mendaki, ke lurah samo menurun. Tatungkuik samo makan tanah, tatelontang samo minum aia. Kato surang dibulati, kato basamo dipeiyokan. Meukua samo panjang, menimbang samo borek. Kenek kayu kenek baan, godang kayu godang baan*. Misi ini dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk *betobo* atau *perari*, yaitu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang membawa hasil.

Sistem ekonomi yang diterapkan dalam mengemban misi tersebut didasarkan kepada; *Elok lenggang pek nan datar. Ilang rono dek panyakik, ilang bangso dek berome. Dek ome segelo kome, dek padi segelo jadi.* Artinya, diperlukan kondisi yang kondusif untuk menjalankan inisiatif dan kreativitas masyarakat agar produktivitasnya meningkat dan sustainable. Tidak akan ter-capainya kinerja yang tinggi bila secara fundamental masyarakat tidak memiliki aset ekonomi yang saling berkesesuaian dan adil. Investasi diperlukan di segala sektor. Untuk itu kebiasaan menabung harus dikembangkan agar memiliki kekuatan dan berdaya secara ekonomi.

Strategi ke Depan

Memasuki millenium kedua mendatang, sempena akan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi yang mandiri, maka strategi pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya tidak keluar dari visi dan misi dalam perspektif adat di atas. Menjadi kabupaten sendiri mengandung beban yang cukup berat, yakni mengembalikan posisi masyarakat Kuantan Singingi pada kesejahteraan ekonominya. Strateginya dimulai dari pengembangan partisipasi masyarakat, penataan kepemilikan aset ekonomi secara adil, penciptaan lingkungan investasi yang kondusif, pembukaan akses terhadap sumber-sumber dan keterisolasian masyarakat, kristalisasi nilai-nilai adat dan budaya, dan pengembangan sistem informasi dan pemasaran yang merata.

Langkah-langkah yang implementatif harus disesuaikan dengan tahapan kepentingannya. *Pertama*, keberadaan lembaga pembiayaan yang independen dan memihak kepada rakyat mendesak untuk direalisasikan. Untuk itu

pembentukan Bank Rakyat Kuantan Singingi (BRKS) yang sahamnya selain dimiliki oleh swasta dan masyarakat, perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin. *Kedua*, Badan Informasi dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Rakyat (BIPKER) dibentuk di setiap kecamatan sebagai lembaga konsultasi dan advokasi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pengembangan komoditas perikanan berkualitas ekspor. Termasuk pula pengembangan potensi danau-danau kecil yang tersebar di berbagai daerah untuk usaha keramba ikan. *Keempat*, penataan agroindustri dari hulu sampai ke industri hilir dengan skala ekonomi yang berorientasi pasar. *Kelima*, pengembangan peternakan dan industri pengolahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.

Keenam, mengombinasikan aset budaya, potensi alam, dan souvenir tradisional ke dalam suatu paket wisata yang menarik. Termasuk di sini memposisikan kembali kota Teluk Kuantan sebagai kota budaya dan pendidikan. Untuk itu keberadaan Perguruan Tinggi (PT) yang berorientasi teknologi industri dan manajemen informasi sangat diperlukan. *Ketujuh*, mereposisikan potensi perkebunan dan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. *Kedelapan*, penataan kelembagaan ekonomi rakyat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang pada akhirnya dapat diarahkan menjadi Koperasi yang berbasis masyarakat. *Terakhir*, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perbaikan prasarana transportasi ke setiap desa sebagai pembuka isolasi masyarakat.***

Signifikansi Industri Berbasis Rakyat

PEMBANGUNAN ekonomi yang berorientasi di sektor industri, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional. Orientasi yang mengandalkan sektor pertanian itu, hanya memperoleh nilai tambah yang kecil dan terperangkap pada kondisi tradisional. Industrialisasi di Indonesia selanjutnya dikembangkan dengan berpijak pada sektor pertanian yang tangguh.

Terjadinya krisis ekonomi, memberikan cerminan yang menyedihkan dari proses industrialisasi di Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan banyak usaha industri yang berguguran menghadapi guncangan krisis perekonomian. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami *booming*. Kondisi ini, terjadi akibat strategi pengembangan industri di Indonesia yang tidak memiliki format yang profesional. Ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, input industri manufaktur masih sangat tergantung pada impor. Sebab, bahan mentah yang diolah

itu, masih harus didukung oleh bahan pembantu yang hanya bisa didapat dari impor. Akibat terjadinya krisis, biaya produksi menjadi tinggi dan daya saing melemah.

Kedua, dalam memproses input sampai pada output, dukungan komponen manufaktur masih sangat tergantung pada impor. Mesin-mesin dalam proses produksi itu, memerlukan suku cadang yang hanya bisa didapat melalui impor. Untuk mengimbangnya, perusahaan di sektor industri melakukan eksploitasi tenaga kerja dan bahan baku secara berlebihan dan tidak etis.

Ketiga, output yang dihasilkan lebih cenderung berorientasi ke dalam negeri. Pasar asing hanya dimasuki oleh beberapa produk yang memiliki nilai komparatif tertentu dan ketersediaannya di pasar internasional itu, hanya dapat dilakukan oleh sumber-sumber dari negara secara spesifik.

Dunia usaha yang bergerak dalam sektor industri kita, selama ini menjadi cenderung manja. Fasilitas yang dinikmati dari pemerintah dan gemuknya pasar dalam negeri, menyebabkan mereka kurang berorientasi pada mutu dan daya saing. Misalnya, industri besar yang dikembangkan di Riau tidak banyak berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Industri besar yang berdomisili di Riau saat ini, justru tidak mampu menyerap tenaga kerja tempatan. Hubungan fungsional industri dan masyarakat disekitarnya juga tidak nampak. Proses alih teknologi dan *trickle down effect* tidak terjadi seperti yang diharapkan. Justru yang muncul adalah kerawanan sosial akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan dan eksklusivitasnya. Bahkan kemerosotan moral

makin mengedepan, sebagai dampak dari perilaku tenaga kerja pendatang dan orang yang datang untuk memenuhi perilaku menyimpangnya.

Secara internal, profesionalisme dan produktivitas sektor industri itu, masih mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Banyak perusahaan yang belum secara optimal mendayagunakan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM). Pengelolaan SDM itu, lebih mengarah kepada eksploitasi yang justru berseberangan dengan pemberdayaan SDM sebagai elemen profesional perusahaan. Disamping itu, pelaku ekonomi sektor industri belum mampu menciptakan pendekatan-pendekatan terhadap praktek manajemen teknologi, sehingga inovasi dan upaya merancang sistem produksi baru, tidak ada. Sebagai akibatnya, daya saing tidak mampu memposisikan perusahaan sesuai dengan dinamika pasar.

Ke depan, persoalan itu, harus makin disadari untuk ditanggulangi secara serius dan konsisten. Dimensi produksi harus dikembangkan dengan mengaju kepada kemajuan teknologi. Kepekaan terhadap percepatan teknologi, tidak harus menunggu tekanan dari luar, tetapi justru harus dimulai dari dalam perusahaan dengan secara kontinyu melakukan kajian terhadap proses produksi inovatif.

Perusahaan harus memposisikan pengembangan SDM dalam kerangka peningkatan produktivitas dan profesionalisme. Pengembangan karier dan kompensasi karyawan harus ditata dalam kerangka yang optimal menuju mutu SDM yang relevan dengan dinamika eksternal perusahaan. Jaringan kerja sama untuk persaingan (*partnership of competitiveness*) harus dibangun kesemua lini terkait

(stakeholders) untuk memperoleh nilai tambah yang tinggi.

Usaha besar dapat saja memilah unit-unit bisnisnya ke dalam unit yang lebih kecil dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang berbasis masyarakat. Unit-unit ini, selanjutnya akan menjadi rangkaian sistem bisnis yang saling terkait dan memperkokoh kemampuan perusahaan memasuki pasar. Keterkaitan fungsional dapat dibangun atas dasar kepentingan bersama, sehingga akan melahirkan sinergi bagi peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Peran pemerintah yang selama ini lebih bertindak sebagai regulator harus ditata ulang. Orientasi kebijakan harus diarahkan pada tataran peranan sebagai fasilitator. Program pembangunan industri dititik-beratkan pada upaya mengangkat produktivitas nasional yang mampu berbicara ditingkat internasional dengan tetap menjaga keseimbangan antar pelaku ekonomi, antar masyarakat, antar wilayah, dan antar waktu. Khusus menyangkut pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), kebijaksanaan pemerintah harus secara tegas mampu memberikan kriteria yang jelas tentang skala usaha yang optimal. Bila unit bisnis UKM terlalu kecil, dapat dilakukan penggabungan usaha dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang terlembaga, tetapi tetap memiliki otonomi usaha dalam unit bisnis yang mandiri. Kebijakan ini penting untuk memfokuskan pembinaan pada bidang-bidang spesifik yang memang diperlukan dan urgen bagi UKM.

Pemerintah harus membangun institusi sosial ekonomi yang berbasis kepada kekuatan masyarakat. Untuk itu, koordinasi secara integratif semua pihak yang terlibat dalam upaya pembinaan harus dilakukan. Ego sektoral sempit

yang muncul, hanya akan melahirkan kebijakan yang saling berbenturan dan tidak produktif bagi pengembangan kualitas UKM sebagai basis pemberdayaan ekonomi rakyat.

Konsistensi kebijakan dalam skema kredit bagi pengembangan usaha harus terus dilanjutkan. Disamping melakukan penyederhanaan dalam memperoleh kredit orientasi pemberiannya pun, harus diubah dari sekedar pamor politik pemerintah ke arah pengembangan institusi ekonomi rakyat secara jelas. Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) selayaknya ditingkatkan pada pengembangan Badan Perkreditan Rakyat Pedesaan (BPRD), sehingga sentuhan dan aliran modal pada unit-unit bisnis yang dikelola masyarakat semakin lancar.

Eksistensi pengusaha kecil dan menengah bagi sistem perekonomian nasional, jelas memiliki posisi yang strategis. Untuk itu, pola pembinaannya jangan sampai hanya bersifat *political will* saja, tetapi harus ditingkatkan menjadi *political action*. Iklim usaha yang kondusif harus diarahkan pada lahirnya UKM yang profesional. Semua pelaku ekonomi harus ditata untuk membangun jaring hubungan fungsional yang sinergis. Pemerintah harus secara sadar dan bertanggung jawab untuk meng-hilangkan distorsi yang terjadi akibat kebijaksanaan yang diterapkan secara diskriminatif selama ini. Pembinaan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil kelompok sasaran dengan mengedepankan prinsip manfaat, kehati-hatian (*prudential*) dan keadilan.***

Siapa “Menjarah” Uang Rakyat Riau? *(Implementasi Ekonomi Kerakyatan RAPBD Riau 2001)*

DI TENGAH hiruk-pikuknya perjuangan tuntutan kebebasan atas “penjajahan” pemerintah pusat, di daerah Riau sendiri berlangsung hal-hal yang sangat memprihatinkan dan diduga sangat erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bersih. Kondisi ini tercermin dari apa yang dapat diamati dalam RAPBD 2001 yang diajukan pemprov Riau kepada DPRD. Dugaan terhadap upaya “penjarahan” terhadap uang rakyat sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut.

Sebagaimana diketahui pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan Pilar Pertama yang ingin ditegakkan Riau dalam pembangunannya memasuki millenium ketiga mendatang. Dalam RAPBD 2001 dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp. 118,544 miliar yang terdiri dari delapan sub-sektor. Sub-sektor Perkebunan mendapat porsi terbesar yakni Rp. 34,086 miliar, diikuti oleh sub-sektor Pengembangan Usaha Daerah sebesar Rp. 22,665 miliar,

sub-sektor Peternakan Rp. 19,905 miliar, sub-sektor Pertanian Rakyat Rp. 17,6641 miliar. Sedangkan sub-sektor Industri hanya sebagian Rp. 4,924 miliar, sub-sektor Koperasi dan Pengusaha Kecil sebesar Rp. 1,851 miliar dan terkecil adalah Sub-sektor Kehutanan yang hanya sebagian jatah Rp. 679,340 juta. Pertanyaannya se-karang adalah untuk kegiatan apa saja uang tersebut dialokasikan?

Contoh menarik adalah mengamati biaya perjalanan dinas pada Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan. Biaya perjalanan dinas untuk proyek ini mencapai Rp. 170,780 juta. Terdapat 10 jenis pelatihan yang akan dilakukan yang diancang menelan biaya mencapai Rp. 1,096 miliar, dan untuk 191 orang target tersebut dianggarkan pula bantuan pinjaman sebesar Rp. 728,875 juta. Sedangkan biaya administrasinya mencapai Rp. 76,062 juta, biaya identifikasi dan seleksi calon sebesar Rp. 55,535 juta, dan biaya supervisi sebesar Rp. 97,825 juta. Ini berarti biaya rata-rata untuk mengembangkan satu orang pengrajin akan mencapai Rp. 11,51 juta.

Sementara itu, untuk Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Perlindungan Konsumen, direncanakan proyek ini akan menelan dana sebesar Rp. 177,655 juta yang mana Rp. 75,675 dianggarkan untuk biaya melatih 60 orang pengelola usaha kecil dan menengah (UKM). Anehnya, biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan proyek ini malah lebih besar dari biaya pelatihan itu sendiri yang mencapai angka Rp. 76,480 juta.

Bila diamati secara keseluruhan, arah dari proses pelatihan dan bantuan pinjaman modal yang dirancang dalam konstruksi proyek, nampaknya banyak tertuju pada

pengembangan mutu. Sekitar Rp. 49,358 miliar dana konstruksi proyek diarahkan untuk pinjaman melalui sistem perbankan bagi pengembangan usaha. Untuk prasarana fisik sebesar Rp. 34,145 miliar, perbaikan mutu Rp. 20,183 miliar, dan proses produksi sebesar Rp. 160,672 juta. Pertanyaan yang muncul dalam masalah ini adalah siapa bank pelaksana yang akan menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada sarasannya dan sudahkah pemprov Riau mempersiapkan tim kreditnya secara matang? Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan tenggelamnya dana tersebut seperti dialami oleh program KUT sebelum ini.

Bila diserahkan pada BPD Riau, ini berarti jumlah kredit yang harus dilemparkannya akan mencapai Rp. 108,436 miliar lebih. Jangkauan BPD Riau nampaknya baru sampai pada tingkat kabupaten, sehingga diperkirakan akan mengalami kerepotan untuk menyampaikan dana tersebut pada sasaran proyek. Belum lagi kendala teknis yang dimilikinya, maka diperkirakan sasaran penyampaian akan mengalami kendala. Di satu sisi masih perlu pula dipertanyakan; apakah rakyat yang terkait dalam proyek-proyek tadi akan secara ikhlas dan siap menerima dana pinjaman tersebut, khususnya dikaitkan dengan tingkat bunga, cara dan jangka waktu pengembaliannya? Apalagi jika masyarakat tersebut semakin menyadari bahwa bantuan tersebut hanyalah sebagian dari uang yang diimplementasikan dalam proyek dan yang lainnya telah "digaruk" aparat, maka niat baik masyarakat untuk mengembalikannya tentu perlu dipertanyakan.

Sama halnya dengan proses dan materi pelatihan dalam setiap proyek arah terbesar adalah terhadap pengembangan

mutu sekitar Rp. 1,728 miliar dan untuk pengembangan unit usaha sebesar Rp. 1,105 miliar. Untuk pengembangan proses produksi dan diversifikasi produk dianggarkan pula dana pelatihan sebesar Rp. 1,352 miliar dan aspek pemasaran hanya mendapat sentuhan dana sebesar Rp. 152 juta. Bila pelatihan-pelatihan ini tidak ditindaklanjuti dengan pengembangan pasar dan kepastian konsumen serta adanya jaringan usaha dalam kerangka kemitraan bisnis terpadu yang menguntungkan, maka hasilnya akan kurang membawa manfaat. Justru pada akhirnya akan timbul kefrustasian peserta, karena setelah mendapat berbagai pelatihan tersebut usahanya tidak juga mengalami perbaikan dan pendapatannya tidak meningkat, sehingga secara ekonomi mereka tetap relatif tidak lebih berdaya.

Pada akhirnya pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagaimana dicanangkan dalam Pilar Pembangunan Riau ke depan masih terasa hambar dan memilukan. Tidak terbayangkan bagaimana caranya aparat birokrasi menyunggingkan senyum kepuasan setelah menerjemahkan keinginan luhur tersebut dalam RAPBD provinsi Riau 2001. Dan apakah teman-teman di DPRD cukup cermat dan arif dalam menyikapinya, sehingga rakyat memang mendapatkan perhatian penuh dalam merancang setiap kebijakan yang lahir di daerah ini?

Kelihatannya dalam mengimplementasikan proses pemberdayaan ekonomi rakyat, belum ada model pendekatan yang terpadu dan terangkai secara apik. Masing-masing sektor saling berdiri sendiri dan maju dengan programnya, tanpa memikirkan kait kelindan dengan program lainnya.

Padahal dalam konsep pemberdayaan ekonomi sangat penting diperhatikan beberapa hal kunci, yakni kepemilikan terhadap aset ekonomi, akses terhadap pasar, kapabilitas dan kompetensi usaha, dan ruang gerak yang adil, demokratis dan adanya keterkaitan antar pelaku ekonomi yang terbentuk atas dasar input-output, serta aspek kepedulian terhadap lingkungan usaha. Penataan aspek-aspek tersebutlah yang akan mampu membawa rakyat pada suasana kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Tanpa itu ia hanya akan menjadi ajang “garuk-menggaruk” dan “jarah-menjarah” belaka.***

“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

ERA global menuntut adanya kemampuan bersaing yang handal. Banyak kekhawatiran yang muncul terhadap kesiapan Indonesia menghadapinya. Dunia usaha Indonesia ternyata sangat kropos sehingga tidak mampu menghadapi situasi bisnis semacam itu. Prediket jago kandang yang disandang pelaku bisnis Indonesia terjadi karena selama ini posisi pemerintah yang begitu dominan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah yang dominan sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi masyarakat telah menjurus pada suatu sistem perekonomian yang serba berperaturan. Akibatnya, timbul distorsi dan inefisiensi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan dunia usaha kepada proteksi dan fasilitas pemerintah.

Dunia usaha menjadi manja dan kurang siap untuk bertarung dalam percaturan Internasional. Justru yang muncul adalah hegemoni ekonomi dari sejumlah

konglomerat yang berkolusi dengan aparat birokrasi. Keadaan ini pada gilirannya ternyata sangat menghambat timbulnya kreativitas masyarakat. Para konglomerat, yang tergolong masyarakat kelas atas, tidak kreatif karena dengan berkolusi mereka telah memperoleh rente yang besar. Rakyat kebanyakan yang berada pada lapis bawah tidak tumbuh prakarsanya, karena sengaja disumbat oleh kaum birokrat yang kolusif. Aparat sendiri hanya kreatif untuk semakin memperkokoh dominasi kekuasaannya.

Setelah dilanda badai krisis, kesadaran atas kesalahan tersebut muncul. Meskipun hanya sebatas retorika belaka, tetapi hawa reformasi telah memunculkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu untuk *diseruakkan* ke tengah-tengah masyarakat. Keinginan untuk mengubah orientasi pembangunan dari pertumbuhan ke arah pemberdayaan rakyat melalui pemerataan membuktikan bahwa selama ini telah terjadi salah kaprah dalam manajemen pembangunan Indonesia.

Dalam pendekatan ekonomi pembangunan, sebenarnya telah diperkenalkan suatu konsep, apa yang disebut dengan *Directly Unproductive Profit seeking activities (DUP's)*. Dalam konsep ini berbagai kegiatan bisnis yang bertujuan komersil melalui cara-cara yang secara langsung tidak produktif mengingat kegiatan ekonomi seperti itu memang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya keberadaan institusi bisnis tidak mendukung tujuan peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh konkritnya di Indonesia adalah berbagai institusi yang pernah terkait dengan tata niaga cengkeh dan tata niaga jeruk di Kalimantan, tata niaga garam di Sumatera.

termasuk pula dunia perbankan dengan segala tingkah lakunya. Anehnya, konsep tersebut tetap saja makin subur dan ini merupakan tantangan yang sangat keras untuk mewujudkan perekonomian rakyat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengedepankan konsep ekonomi rakyat akan mendapat tantangan dari keberadaan pelaku bisnis yang selama ini mendapat lisensi dari pemerintah. Sementara keberpihakan pemerintah yang berlebihan pada suatu kelompok masyarakat justru bertentangan dengan azas kebebasan berusaha. Dalam kondisi empiris (*Ginjar Kartasmita, 1996*) pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu harus dipahami sebagai upaya mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat. Iklim yang sehat perlu diciptakan untuk memungkinkan berkembangnya usaha masyarakat.

Agar ekonomi rakyat tidak menjadi sekedar mimpi dan bermanfaat pada sampai “retorika” belaka, maka dibutuhkan kesungguhan untuk menempatkan rakyat pada posisi yang strategis. Bukan sebagai objek pembangunan belaka, yang justru kadang-kadang malah makin menyengsarakan mereka. Strateginya berpusat pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara cepat untuk memperkuat kedudukan dan peranan rakyat dalam setiap struktur perekonomian. Perubahan struktural ini (*Gunawan S, 1999*) akan merupakan proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi sub-sistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Community Based Economy memang hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam mengantisipasi liberalisasi mendatang. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah harus berpijak pada beberapa prinsip dasar, yakni memperbesar akses ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi, dan merealisasi otonomi daerah secepat mungkin.

Akses ekonomi dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memasuki pasar (*market entry*) dan memiliki sumber-sumber ekonomi secara bertanggung jawab. Khusus bagi pengusaha kecil dan menengah, perlu kiranya diberikan kesempatan berusaha pada kondisi yang terlepas dari monopoli dan lisensi yang tidak memihak mereka. Efisiensi didorong melalui munculnya kompetitor dalam usaha yang sehat. Sedangkan pengembangan otonomi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari keberadaan masyarakat tempatan.

Beberapa langkah, khususnya di daerah Riau, perlu dilakukan. *Pertama*, pemetaan wilayah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Termasuk wilayah yang akan dijadikan basis pertumbuhan disetiap kabupaten. *Kedua*, pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pembukaan isolasi masyarakat, khususnya kepada sentra-sentra produksi ke pasarnya.

Ketiga, mengembangkan keterkaitan fungsional dan mutualisme antara masyarakat dengan industri. Sangat dituntut tanggung jawab perusahaan-perusahaan berskala besar untuk tidak saja memelihara fasilitas masyarakat yang ada, tetapi juga mengkaitkan usahanya dengan

pengembangan usaha masyarakat. *Keempat*, pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lapis bawah dengan menempatkan mereka sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, SDM ditingkat ini harus dimutuskan sesuai dengan arah pengembangan usahanya. *Kelima*, menumbuhkan lembaga pembiayaan masyarakat desa dalam bentuk Bank Desa.

Keenam, penataan ulang kepemilikan tanah dan peruntukkannya diarahkan pada diversifikasi komoditas unggulan daerah. *Ketujuh*, mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam menentukan objek pembangunan dan pengelolaannya. *Participatory development strategy* seperti harus dapat diuji lewat pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Legitimasi birokrasi yang selama ini dominan harus diubah fungsi menjadi katalisator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan masyarakat, agar pemberdayaan ekonomi rakyat tidak sekedar “retorika” belaka.***

Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat

MENGUKUR kinerja setahun pemerintahan gubernur Riau terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak mungkin dilakukan melalui pendekatan hasil (*output*). Dalam waktu pendek, tidak mungkin menyulap ekonomi rakyat dari subsistem menjadi modern, dari tradisional menjadi ekonomi yang canggih, dari skala yang kecil menjadi ekonomi berskala besar.

Pendekatan yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mengamati apakah kebijaksanaan yang ditempuh oleh gubernur memiliki konteks yang jelas dan mengukur relevansinya terhadap pemberdayaan rakyat dalam bidang ekonomi.

Kepemimpinan gubernur Riau sekarang sejak diangkat untuk memegang tongkat komando pembangunan rakyat, dihadapkan pada situasi yang cukup berat. Proses reformasi yang bergulir deras memberikan kesempatan pada banyak orang untuk mengedepankan berbagai masalah yang selama

ini menghimpit. Krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan membutuhkan sikap politik yang piawai seorang pemimpin. Pandangan yang cermat dan kemampuan mengantisipasi keadaan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki agar situasi yang cenderung kacau tidak mengeskklasi menjadi amburadul.

Dalam arena yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, pluralisme politik belum memiliki format menuju konsensus yang tertata apik. Timbul degredasi sikap masyarakat terhadap kepatuhan pada aturan main yang berlaku. Situasi ini menyulitkan bagi Bergeraknya roda perekonomian dan melakukan penataan ruang gerak pelaku-pelaku ekonomi. Tataran paling mungkin dibuat adalah melakukan konsolidasi segenap elemen masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi bagi berputarnya roda perekonomian.

Bagi sebagian besar masyarakat Riau yang memang hidup di sektor pertanian, krisis ekonomi justru seperti memberi berkah. Melemahnya nilai rupiah telah mendongkrak harga komoditas pertanian. Karet yang pada mulanya berharga Rp. 900 perkilonya, naik menjadi Rp. 2.850. Sedangkan sawit menikmati peningkatan pendapatan sampai Rp. 2,5 juta perbulannya. Ini berarti, sebagian besar rakyat memiliki kesempatan untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif. Seharusnya pemerintah Riau mampu memfasilitasinya.

Membaiknya nilai tukar rupiah menyebabkan pendapatan masyarakat petani kembali terkoreksi sampai 70 persen. Sementara itu, harga-harga tidak beranjak turun secara memadai. Proses pemiskinan rakyat kembali terjadi

karena daya beli masyarakat turun drastis. Dalam konteks inilah sebenarnya sangat dibutuhkan kebijaksanaan strategis agar fluktuasi ekonomi tidak menyebabkan rakyat makin terombang-ambing.

Pertama, implementasi demokrasi ekonomi harus dijalankan secara konsisten melalui kebijaksanaan pembangunan yang memihak rakyat. Penting sekali diupayakan agar rakyat memiliki kesempatan untuk memperoleh aset ekonomi yang mampu menjamin kehidupan ekonominya secara berkelanjutan. Pada tataran ini kelihatannya belum banyak yang mampu dilakukan oleh gubernur. Ironis sekali jika rakyat justru harus “melempari” gubernurnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka.

Kedua, eksploitasi sepihak yang membuat rakyat tidak berwenang dalam pembangunan harus dihentikan. Sayangnya ini belum menjadi perhatian yang serius pemerintah Riau. Dalam perencanaan pembangunan misalnya, prinsip yang diterapkan masih bersifat *top-down*. Kenyataan ini nampak dari nota keuangan yang diajukan gubernur Riau dalam menentukan *budget* pembangunan. Dari Rp.17,9 miliar dana yang dianggarkan untuk pembangunan sub-sektor tanaman pangan, 35 persen diantaranya diindikasikan bersifat semu atau nonproduktif.

Termasuk Rp. 18,1 miliar dana yang dianggarkan untuk pembangunan sumber daya air dan irigasi diperkirakan hanya akan mengalir ke saku pejabat, karena kurang urgen jika dipandang dari kepentingan masyarakat. Entah sudah berapa banyak irigasi yang dibangun di Riau, namun signifikansinya terhadap peningkatan nilai tambah produksi

tanaman pangan tidak memadai. Sektor industri yang diharapkan mampu menopang berkurangnya kesenjangan ekonomi rakyat hanya sebagian jatah Rp. 2,3 miliar. Itupun 41,3 persen diantaranya diarahkan untuk hal-hal yang kurang terkait dengan perbaikan kinerja produksi industri rakyat yang berorientasi ekspor.

Ketiga, hambatan-hambatan struktural yang selama ini ditemui di lapangan haruslah segera dihapus melalui koordinasi yang integratif. Semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, mesti memiliki kesamaan visi dan kinerja mutu yang optimal. Kita sangat prihatin dengan dilecehkannya surat keputusan gubernur tentang penertiban angkutan kayu. Kenyataan ini mengindikasikan lemahnya birokrasi kita dalam menata kehidupan perekonomian pada skala yang lebih luas dan lebih komprehensif.

Keempat, kemampuan pemerintah mengembangkan usaha kecil masyarakat harus dijalankan berdasarkan format yang mengakar pada permasalahan riil yang dihadapi rakyat. Hubungan fungsional antara pelaku ekonomi, antara struktur ekonomi, antar kelompok komunitas, dan antar wilayah harus didefinisikan dengan jelas. Persoalan ini nampaknya masih jauh dari format kebijakan yang diambil pemerintah Riau. Justru perusahaan-perusahaan pemburu rente yang selama ini mengeksploitasi Riau, yang aktif menjustifikasi perbuatan mereka melalui program *community development (CD)* yang sporadis.

Mencermati keempat faktor di atas, kiranya masih dibutuhkan kerja keras agar diperoleh format yang integratif dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan, Bersaing *(Renungan 52 Tahun Indonesia Merdeka)*

MEMASUKI abad 21 nanti, tantangan besar menghadang bangsa Indonesia. Dalam dunia tanpa batas penetrasi kapital yang sangat cepat akan merubah posisi ekonomi secara global. Dalam jurnal *Global Economic Prospects* yang diterbitkan Bank Dunia, output negara-negara berkembang akan semakin besar (di atas 60%). Sedangkan negara-negara maju akan makin mengecil (sekitar 35 sampai 40%). Disamping peningkatan harus investasi internasional, kecenderungan tersebut muncul karena beberapa hal. *Pertama*, berkembangnya saling ketergantungan perdagangan yang beralih dari barang-barang ke jasa-jasa.

Kedua, investasi keuangan meningkat. Pasar modal antar negara makin sensitif terhadap sentimen apapun yang terjadi diberbagai negara tersebut. *Ketiga*, difusi teknologi yang sangat cepat yang menyebabkan siklus kehidupan produk semakin pendek. Para produser bersaing ketat untuk merebut pasar dan memanen keuntungan dalam waktu yang

terbatas. Kondisi ini selanjutnya melahirkan cara-cara bersaing yang kurang “fair,” tetapi tidak jarang memacu inovasi baru. Sedangkan yang *keempat*, tingkat pemusatan pasar.

Indonesia sendiri tidak harus merasa pesimis mengantisipasi abad ekonomi global tersebut. Studi yang dilakukan oleh *Goldman Sach Global* mengemukakan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan serius, Indonesia diperkirakan mampu melewati kesulitan-kesulitan untuk bisa bergabung dalam jajaran negara-negara industri baru. Untuk itu, Indonesia dituntut kemampuannya dalam mempertahankan stabilitas makro ekonomi, dinamisme ekspor serta memperbaiki produktivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara berproses dan bertahap, sebenarnya Indonesia sudah memilih ekonomi yang terbuka dan memilih ekonomi pasar yang terkendali. Dalam kaitan pembangunan ekonomi dan aktivitasnya, mekanisme ini diyakini berkemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih kecil. Namun demikian, memasuki millenium kedua nanti, agenda yang paling besar yang dihadapi adalah menyangkut persoalan pemerataan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM untuk mengembangkan kemampuan bersaing masyarakat. Kendali dalam pasar bebas tidak dapat ditentukan lagi oleh regulasi dan keberpihakan yang tidak proporsional, tetapi lebih ditentukan oleh semangat kewirausahaan dan inovasi yang kontinyu.

Kemitraan Kerakyatan

Konsep pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai sentral pendukung utama pembangunan

sesungguhnya juga dianut GBHN. Pembangunan hendaklah dipandang sebagai transformasi yang mengacu kepada ketiga kebutuhan dasar masyarakat. *Pertama*, keadilan dalam arti diperlukan pemahaman bahwa setiap orang memiliki cara untuk melangsungkan kehidupannya dan sudah selayaknya memperoleh peluang dan hak yang sama untuk berusaha menyediakan kebutuhan hidup keluarganya.

Kedua, berkesinambungan (*sustainable*), yaitu setiap generasi hendaklah mematuhi kewajiban untuk mengolah dan memelihara sumber daya alam (SDA) yang ada untuk generasi selanjutnya. *Ketiga*, kesetiakawanan atau kebersamaan (*inclusiveness*), yaitu tuntutan bahwa setiap orang tanpa kecuali perlu pengakuan atau kemampuan produktivitasnya dan memiliki hak dan kewajiban untuk saling berbagi kemampuannya bagi masyarakat luas.

Kebutuhan dasar tersebut, memperkuat betapa pentingnya peranan rakyat dalam pembangunan yang secara populer dikenal sebagai *people center development*. Untuk menegakkan komitmen ini sehingga pembangunan memang lebih terasa memiliki keberpihakan kepada masyarakat luas diperlukan pembaharuan bidang ekonomi, yang dimulai dari penataan kelembagaan (*institutional arrangement*). Penataan ini akan mencakup mulai dari aspek hukum, pendidikan, sistem insentif sampai dengan kelembagaan-kelembagaan tradisional.

Strategi pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan telah melahirkan banyak kelemahan. Strategi ini tidak menghasilkan suatu homogenitas, melainkan suatu heterogenitas struktural yang ditandai oleh kesenjangan produktivitas antar sektor ekonomi yang makin tajam. Disamping itu, yang berkembang hanya industri yang

berskala besar dan menengah yang terpusat pada wilayah perkotaan. Sementara wilayah pedesaan belum tersentuh secara seimbang. Kesenjangan ini pada akhirnya melahirkan urbanisasi prematur dan deformasi struktural dalam perekonomian.

Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya masih sangat diperlukan rekonstruksi pendekatan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Jhon P. Lewis (1987) dalam bukunya 'Development Strategic Reconsidered' menyatakan bahwa upaya kritis terhadap proses pelaksanaan pembangunan perlu terus menerus dilakukan sebagai usaha untuk menemukan formula dalam mengefektifkan pembangunan. Beberapa prinsip dasar untuk melakukan rekonstruksi manajemen pembangunan adalah memperkuat akses ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi dan melanjutkan pengembangan otonomisasi daerah.

Selanjutnya usaha melanjutkan pembangunan, khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dengan nilai tambah yang optimal sangat tergantung pada usaha-usaha sebagai berikut: 1). Meningkatkan jumlah input. Dalam artian memperbanyak modal di berbagai segmen kegiatan ekonomi. 2). Perbaiki kualitas input investasi, baik modal fisik maupun sumberdaya manusia. 3). Percepatan dari proses produksi yang rendah produktivitasnya ke proses produksi yang lebih tinggi nilai tambahnya.

Aspek Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan Indonesia. Fenomena ini muncul dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih mementingkan pertumbuhan dan

kurang mendekati diri pada aspek pemerataan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tulisan ini.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia masih terbelit oleh masalah yang bersifat klasik. Keberhasilannya masih jauh dari harapan, apalagi dari kondisi terentasnya kemiskinan itu sendiri. Melalui program IDT misalnya, pemerintah berupaya untuk mengembangkan kemandirian usaha-usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Setelah dua tahun pelaksanaannya, terbukti banyak modal IDT tidak secara fisik dikembalikan dalam bentuk uang. Penangguliran antar kelompok masyarakat masih sulit dideteksi keberhasilannya.

Berdasarkan hasil laporan dari Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Riau yang disampaikan dalam lokakarya program penanggulangan kemiskinan di provinsi Riau, persentase pengembalian dana IDT Tahun 1994/1995 adalah sebesar 18% dan Tahun 1995/1996 turun menjadi 10%. Pada Tahun 1996/1997 baru mencapai 1%. Namun demikian, persentase pengguliran dana IDT oleh Pokmas cukup besar. Tahun 1994/1995 saja mencapai angka 88% dan Tahun 1995/1996 sebesar 83%. Sedangkan untuk Tahun 1996/1997 baru mencapai 5%. Hanya saja tidak dapat diidentifikasi apakah pengguliran tersebut telah mampu mengembangkan usaha Pokmas, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ada kekhawatiran bahwa dana yang digulirkan tersebut bukan bersumber dari peningkatan produktivitas usaha, tetapi semata-mata hanya karena tanggung jawab saja yang telah jatuh temponya dana bantuan IDT yang diterima Pokmas. Masih terlihat dilapangan, banyak usaha Pokmas

yang tidak tepat dan tidak strategis, seperti usaha yang memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang dan berisiko tinggi. Berdasarkan data dari Menteri Dalam Negeri pada bulan Juni 1996 perkembangan usaha Pokmas di Provinsi hanya mencapai 12,09%. Ini sangat jauh di bawah Yogyakarta yang mencapai 209,58% dan Sumatera Selatan yang mencapai 34,97%. Secara umum di Indonesia perkembangan usaha Pokmas hanya mencapai 42,02%.

Keunggulan Bersaing

Untuk duduk sejajar sebagai negara industri maju, Indonesia harus melakukan redefinisi konsep pembangunan. Prinsip pemerataan harus diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan keunggulan bersaing masyarakat. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak untuk itu. Perusahaan Taiwan dalam memasuki pasar global tahun 1970-an, tidak terlepas dari pengembangan sumberdaya manusia. Jalan yang ditempuh Taiwan untuk mencapai format reformasi ekonominya tidak mengenal *magic formula*.. Proses yang ditempuh hampir sama dengan negara industri baru lainnya. Hanya saja dimensi manusianya, semangat kerja keras, kemandirian dan etos kerjanya lebih menonjol.

Dalam kasus Indonesia, pengembangan SDM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas agar mereka mampu bersaing dalam penguasaan pasar. Ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya. *Pertama*, meningkatkan pendidikan masyarakat yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kualitas SDM. Ini membawa konsekuensi pada pembesaran anggaran untuk pendidikan dan anggaran

pembangunan.

Kedua, link and match dengan memasukkan materi pendidikan yang berorientasi pada dasar kerja. Ini bisa ditempuh melalui keterlibatan asosiasi pengusaha profesi. *Ketiga*, pelatihan dan pemagangan yang disusun berdasarkan standar kualifikasi keterampilan yang diisyaratkan pada jabatan tertentu.

Keempat, pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang ada dan produktivitas kerja mereka. Ini membawa konsekuensi pada keterpaduan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.

Khusus untuk provinsi Riau, segala upaya di atas harus didahului oleh perbaikan infrastruktur yang ada. Sangat ironis memang, setelah 52 tahun Indonesia merdeka hanya kekayaan yang terdapat di daerah ini yang dihisap untuk kepentingan pembangunan di Indonesia. Sementara itu infrastrukturnya tetap tidak mendapat kucuran dana pembangunan yang memadai.

Sudah saatnya bagi masyarakat Riau memasuki millenium kedua mendatang. Upaya meningkatkan keunggulan bersaing memasyarakatkan Riau tidak dapat ditempuh hanya dengan mengubah hutan-hutan Riau menjadi kebun kelapa sawit. Apalagi dengan menjual segala isi hutan tersebut secara ilegal dan tanpa kecuali.

Pengembangan kualitas SDM di provinsi yang kaya minyak ini tidak akan mencapai hasil yang optimal hanya dengan mengandalkan investasi yang besar, yang tidak didukung oleh keterkaitan pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk itulah tolak ukur utama keberhasilan pembangunan di provinsi ini harus didasarkan pada perbaikan

IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjajahan Ekonomi

UPAYA pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ditempuh melalui kebijaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Masing-masing desa yang tergolong ke dalam desa miskin diberikan dana sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut merupakan dana 'bergulir' yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada di masing-masing desa miskin.

Melalui bantuan dana ini, kelompok-kelompok usaha tersebut diharapkan mampu mengembangkan unit usahanya baik melalui pemanfaatan dana sebagai tambahan modal kerja maupun untuk perluasan skala usaha. Dengan demikian pada tahap selanjutnya tingkat pengembalian investasi modal akan menjadi dana cadangan baru, baik untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sekarang maupun untuk membuka unit baru bagi kelompok usaha yang lainnya. Sistem tersebut secara terus menerus diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dari yang

tergolong 'miskin' atau 'tertinggal' menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dalam kenyataannya program atau kebijaksanaan IDT yang sudah mulai digulirkan, khususnya di daerah Riau, mengalami berbagai hambatan atau kendala yang sangat "prinsipil," sehingga hasil yang ingin dicapai seperti hanya akan menjadi "mimpi indah" belaka. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya indikasi akan ketidakberhasilan program IDT di masa yang akan datang. Kasus-kasus menarik yang saat ini melekat dalam pelaksanaan program IDT di Riau sangat bervariasi. Mulai dengan adanya miskonsepsi tentang IDT tersebut dari aparat birokrasi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, sampai pada strategis persaingan yang diterapkan pengusaha swasta yang selama ini beroperasi di sekitar desa yang mendapat program IDT yang dapat dinilai sebagai strategi yang tidak etis dan berbau "penjarahan ekonomi". Termasuk pula adanya kelemahan sumberdaya manusia, baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat penerima bantuan itu sendiri.

Miskonsepsi tentang program IDT terjadi baik di aparat desa maupun pada kelompok usaha yang menerima bantuan. Mungkin karena adanya strata pelatihan dan para camat sendiri belum dibekali pemahaman yang mendalam tentang IDT menyebabkan adanya "bias informasi" dari apa yang sesungguhnya diinginkan oleh kebijaksanaan IDT dengan apa yang sampai pada para Kepala Desa yang belum memahami fungsi dari tenaga pendamping. Ada tenaga pendamping yang justru diambil dari aparat desa. Disamping itu tidak jarang terselip adanya kepentingan

aparatus desa yang berkepentingan dengan kelompok usaha. Dalam membeli barang-barang keperluan usaha misalnya, yang bersumber dari dana IDT, ketua kelompok tidak lepas dari kendali kepala desa. Paling tidak kepala desa tetap mendampingi.

Masalah lain yang sering terjadi adalah tidak dilakukannya “temu kenali” penduduk miskin. Akibatnya, seleksi anggota kelompok tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini terbukti dengan adanya kerabat para kepala desa yang menjadi anggota kelompok, apakah itu mertua, keponakan, bahkan mungkin anak, yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai penerima dana, sekarang menjadi penerima dana tersebut. Terdapat pula kasus dimana di suatu desa dibentuk 6 (enam) kelompok masyarakat yang direncanakan untuk diikuti dalam program IDT, tetapi karena pada tahun pertama hanya 2 kelompok, maka yang didaftarkan sebagai penerima IDT hanya 2 kelompok tersebut, sedangkan 4 kelompok lainnya ternyata tidak didaftarkan, sehingga pada tahap selanjutnya tertutup kemungkinannya untuk menerima bantuan IDT.

Pada tingkat masyarakat juga masih terdapat kesalahpahaman tentang IDT, dimana seolah-olah dana yang diberikan tidak ubahnya sebagai “bantuan” belaka yang bila tidak dapat dikembalikan nantinya akan “diputihkan”. Kasus yang menarik dalam hal ini adalah seperti yang terjadi di Desa Bante, Kecamatan Mandah. Salah seorang dari penerima dana IDT tersebut bukan menggunakannya untuk mengembangkan usaha, sehingga skala ternak ayam buras yang dikelolanya makin besar, melainkan digunakan untuk “mengecat” kandang ayam. Uniknya lagi, ayam sebanyak

25 ekor yang selama ini dipeliharanya “dialihstatuskan” menjadi milik kelompok, yaitu dibeli dengan menggunakan bantuan dana IDT. Meskipun sesungguhnya, yang menjadi kelompok tersebut adalah dia sendiri sebagai pemilik awal. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dengan adanya dana IDT hanyalah kandang yang sudah dicat bagus dan diberi nama kelompok.

Kasus lain yang amat menarik ditengah-tengah masyarakat penerima IDT adalah seperti yang dilakukan seorang yang berusaha dalam mengembangkan tanaman jahe. Dana IDT yang diperoleh sebesar Rp. 400.000,- digunakan untuk “membeli emas perhiasan”. Tanaman jahe yang dikelola selama ini tetap ditekuni seperti apa adanya semula. Menurut yang bersangkutan, emas yang dibeli dari dana IDT nantinya akan dijual bila tiba saatnya untuk mengembalikan dana IDT, bila memang usaha jahe yang ada sekarang tidak bisa membayarnya. Jadi, sambil menabungkan dana tersebut dapat pula digunakan untuk berhias, bila ada cara tematen dan lainnya.

Keadaan tersebut membuktikan bahwa betapa lemahnya pemahaman yang bersangkutan terhadap program IDT. Tingkat pengembalian investasi yang dimaksudnya tidak lain hanya kemampuan mengembalikan modal yang dipinjamkan. Skala usaha tetap saja tidak berubah. Sehingga harapan untuk mengentaskannya dari kemiskinan melalui usaha tersebut hanyalah “utopia” belaka.

Sebenarnya masih ada kelompok masyarakat yang memang menyadari betapa pentingnya dana IDT untuk mengembangkan usahanya. Namun, bantuan dana semata-mata ternyata tidak cukup. Persaingan yang terjadi dengan

pihak swasta lain menyebabkan investasi yang ditanamkan dapat menjadi sia-sia belaka. Sebagai salah satu contoh mungkin dapat diambil dari apa yang dialami kelompok masyarakat penerima IDT di Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Dana IDT yang mereka terima digunakan untuk perbaikan dan perluasan mesin, dengan harapan sagu masyarakat yang dapat diolah akan semakin besar dan pabrik sagu dapat menambah kapasitas usahanya. Ternyata di daerah tersebut terdapat pula usaha pabrik sagu yang dikelola oleh pengusaha “nonpribumi”.

Dalam upaya menanggulangi persaingan dengan usaha masyarakat penerima IDT tersebut, sang pengusaha (yang memang memiliki modal yang kuat) mengantisipasinya dengan strategi penguasaan bahan baku. Melalui “sistem ijon” dilakukan pembelian pohon-pohon sagu masyarakat. Untuk memancing masyarakat agar mau menjual pohon sagunya (meskipun masih kecil), harga yang selama ini hanya Rp. 2.000,- dinaikkan menjadi Rp. 4.000,- per batang. Strategi ini ternyata cukup ampuh untuk mengalahkan usaha kelompok masyarakat penerima IDT, karena selesainya pengembangan pabrik kelompok masyarakat tersebut, bahan baku sudah langka dan harga relatif tinggi.

Dengan demikian pabrik kelompok masyarakat penerima IDT kapasitas terpasangnya tetap naik, tetapi realisasi produksinya tetap saja seperti semula. Apalagi jaringan pemasaran hasil produksi dikuasai pula oleh pengusaha “nonpribumi” tersebut, sehingga dikhawatirkan usaha yang dikelola oleh masyarakat penerima IDT bukannya jadi berkembang, tetapi malah menjadi mati. Kesiapan mereka menghadapi “penjajahan ekonomi” yang

sedemikian rupa memang sangat terbatas sekali.

Kunci permasalahan sebagai sumber penyebab timbulnya kasus-kasus di atas, disamping karena miskonsepsi antar strata birokrasi pemerintahan, lebih dominan bersumber dari lemahnya kemampuan para camat dan aparatnya (khususnya Kasi PMD) melakukan penelitian terhadap “kelayakan” suatu usaha. Penentuan jenis usaha memang sepenuhnya menjadi hak otonom dari kelompok masyarakat, tetapi camat dan Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) mempunyai wewenang untuk menilai layak tidaknya usaha yang dipilih oleh kelompok masyarakat.

Daftar Usulan Kegiatan Kelompok (DUKK) baru akan menjadi Daftar Isian Kegiatan Kelompok (DIKK) yang menjadi modal untuk pencarian dana IDT ke BRI merupakan tanggung jawab dan hasil penilaian yang dilakukan camat melalui Kasi PMD. Bukan ingin melemahkan arti dari keberadaan dan usaha keras para camat dan Kasi PMD tersebut dalam mensukseskan program IDT, tetapi sampai seberapa jauh mereka mendalami dan memahami prinsip-prinsip dasar dan implementasi “analisis SWOT” sebagai salah satu alat untuk menentukan ada tidaknya “peluang usaha” yang sangat layak untuk ditekuni, tentunya masih perlu kita pertanyakan.

Proposal kegiatan bisnis yang diajukan oleh setiap kelompok haruslah dinilai oleh camat melalui Kasi PMD untuk dituangkan ke dalam DIKK. Penelitian yang dilakukan tersebut tentunya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip atau filosofi-filosofi bisnis yang sesungguhnya. Hal itulah kiranya yang belum dimiliki oleh camat, Kasi PMD dan ketua kelompok usaha masyarakat tertinggal. Belum

terlambat kiranya kalau mereka dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang “management strategic” dan evaluasi proyek untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi prosposal bisnis yang diajukan.

Mumpung program IDT baru berjalan tahun pertama, sehingga pada tahap-tahap selanjutnya mereka (camat, Kasi PMD, dan ketua kelompok) memiliki kemampuan mengevaluasi DUKK dan melahirkan usaha-usaha yang memang produktif dikembangkan sebagai upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pola pelatihan “studi kelayakan proyek” yang selama ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Riau bekerjasama dengan Kanwil Koperasi dan PKK dalam memberi bekal pada para manajer koperasi untuk mampu menilai kelayakan “usaha nonprogram” di KUD, mungkin dapat dijadikan contoh dan dikembangkan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan camat, Kasi PMD dan ketua kelompok usaha masyarakat desa tertinggal dalam mengevaluasi peluang dan kelayakan bisnis. Semoga.***

Bagian Tiga:

**Masih Adakah Tempat
untuk “si Kecil”?**

Secangkir Kopi, Segudang Informasi *(Kunci Sukses “Positioning” Usaha Kecil Menengah)*

PASAR merupakan suatu yang sangat berharga bagi perusahaan. Di dalamnya, terdapat sejumlah orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Mereka juga terdiri dari orang-orang yang mampu dan mau membeli sehingga antara perusahaan dengan konsumen terjadi transaksi yang saling menguntungkan. Interaksi antara produsen dengan pelanggannya sangat penting artinya. Keseimbangan perolehan laba akan sangat tergantung pada kelestarian hubungan antara keduanya. Di sisi lain, kehilangan hubungan baik tersebut akan bermuara pada kehancuran perusahaan karena kesempatannya memperoleh penjualan makin terbatas.

Sebagian perusahaan sangat canggih dalam menemukan dirinya di benak pelanggan sehingga produk yang dihasilkan gampang terjual. Bagi sebagian perusahaan lainnya ada yang berpijak pada prinsip “ada barang ada yang dibeli,” sehingga tidak jarang mereka melakukan kerja

yang amat keras agar hasil produksinya dapat habis terjual. Bahkan biaya promosi yang dikeluarkan untuk itu sering membuat mereka tidak mampu “bernapas” karena kontribusi margin yang diperoleh sangat tidak memadai untuk menutupi biaya perusahaan. Perusahaan “kembang kempis ketika pelanggan meminta servis lebih”.

Bagaimana menempatkan perusahaan pada pasar yang paling sesuai dan pelanggan yang tetap adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk keluar dari proses bisnis *kick and run* dalam melayani konsumen. Strategi yang ditempuh adalah dengan menerapkan pendekatan STP (Segmentation, Targeting, and Positioning) seperti yang pernah dipopulerkan oleh Philip Kotler.

Segmentasi merupakan upaya untuk membagi-bagi pasar pada segmen-segmen tertentu. Dasarnya bisa demografis, sosial, psikografis dan perilaku. Sedangkan Targeting menyangkut pemilihan segmen yang paling tepat untuk dimasuki. Target tersebut dapat tunggal ataupun multi segmen, tergantung dari kemampuan sumberdaya perusahaan dan tujuan yang ingin dicapainya.

Positioning terkait dengan bagaimana menempatkan perusahaan dan produk yang telah dibuat “sesuai” dengan keinginan pelanggan pada target pasar yang telah ditentukan. Di sini sangat dibutuhkan kemampuan menangkap dinamika pelanggan dan preferensi selera mereka. Kepekaan terhadap pelanggan akan menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk kepentingan *positioning*.

Kualitas sebuah segmen pasar ditentukan tingkat di mana besar daya beli segmen yang terukur dan kemampuan segmen tersebut mendatangkan keuntungan.

Di samping itu harus memperhitungkan pula derajatnya untuk dijangkau dan dilayani, termasuk program-program yang dapat efektif guna menarik isi segmen.

Suatu segmen pasar menjadi tidak menarik bila di dalamnya terdapat banyak pesaing yang kuat dan agresif dan atau segmen tersebut sangat terbuka dalam mengundang *new entrant*. Kekuatan barang pengganti dan *bargaining position* dari konsumen dan pemasok juga dapat membuat sebuah segmen menjadi tidak sesuai untuk dimasuki. Dalam memilih segmen yang akan dijadikan target pasar perlu pula dipertimbangkan hubungan antar segmen dan potensi perkembangannya.

Adanya segmen yang jelas untuk dijadikan target pasar yang tepat belum tentu menjamin keberhasilan perusahaan meraup pelanggan bila *positioning* tidak dikelola secara akurat. Di masa krisis dewasa ini persoalan penempatan produk di benak konsumen akan semakin rewel karena adanya reduksi dari kemampuan daya beli mereka. Untuk mampu “menggelitik” hasrat membeli konsumen *positioning* yang dilakukan harus terhindar dari perangkap kesalahan-kesalahan klasik yang melekatinya.

Beberapa pembeli terkadang hanya punya sedikit informasi tentang suatu merek sehingga *positioning* yang terlalu rendah akan kurang bermanfaat. Di sisi lain *positioning* yang terlalu tinggi terhadap konsumen yang memiliki sedikit gambaran terhadap sebuah merek juga kurang efektif.

Positioning juga harus dihindarkan dari sesuatu yang akan menimbulkan keragu-raguan atau bahkan membingungkan konsumen. Kebingungan dan keragu-raguan justru hanya akan menimbulkan kecurigaan konsumen terhadap

perusahaan dan produk yang dihasilkannya. Karena itu keterbatasan informasi tentang pasar dan pelanggan akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam menentukan target pasar dan menempatkan posisinya dibenak konsumen.

Bagi usaha kecil dan menengah (UKM) persoalan segmentasi tidak begitu rumit karena skala ekonomi usaha mereka dan luas pasarnya relatif terbatas. Demikian juga dalam menentukan target pasar mengingat produk yang dihasilkannya dan substansi segmen yang terukur. Hanya saja dalam melakukan positioning mereka sering menghadapi kendala, baik karena kurang memahami arti pentingnya maupun karena keterbatasan informasi.

Akses mereka terhadap pasar sangat minim dan informasi tak dapat dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sumber bahan baku dan proses produksi yang bermutu sesuai senantiasa tertinggal sejalan dengan perkembangan dinamika konsumen. Kepekaan terhadap perilaku pelanggan sangat lemah karena prinsip *"secangkir kopi segudang informasi"* seringkali terlupakan. Artinya, masih banyak UKM yang tidak memandang penggalan informasi disekitarnya adalah penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Mereka bahkan tidak tahu di mana informasi diperoleh apalagi memanfaatkannya.

Pemerintah, khususnya instansi yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan UKM harus menjadikan keterbelakangan informasi sebagai salah satu focus program. Ironis sekali jika instansi tersebut juga sangat kekurangan informasi tentang UKM itu sendiri. Jika demikian maka UKM tidak akan pernah keluar dari

lingkaran setan yang melilitnya.

Sudah saatnya di propinsi Riau ada suatu badan yang mengelola informasi “dua sisi “ tentang UKM ini agar pola dan metode pengembanganya dapat diarahkan sesuai dengan dinamika pasar. Peran usaha kecil dan menengah dalam mengisi peluang pasar dengan di berlakukannya undang-undang anti monopoli dan per saingan usaha tidak sehat sangat urgen. Mereka dapat menjadi “penyelamat” dalam mengatasi kelangkaan produk dipasaran karena usaha konglomerat terpaksa menciutkan pangsa pasar mereka dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.***

Mendukung Pemberdayaan UKM Riau

PERSOALAN ekonomi Indonesia tidak hanya terbatas persoalan teknis saja. Namun juga masalah ekonomi politik. Begitu juga di daerah seperti Riau. Interaksi yang intensif yang terjadi antara pengambil kebijakan (eksekutif) dengan pelaku bisnis (*business man*) berskala besar, telah mempengaruhi dan men distorsi aktivitas dunia usaha yang hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok orang tertentu, yaitu kepada orang-orang yang berada dalam lingkaran aktivitas tersebut.

Usaha kecil yang juga merupakan bagian dari interaksi dan aktivitas dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional apalagi di daerah menjadi terpinggirkan. Sehingga mereka, usaha kecil ini dipaksakan untuk mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tanpa fasilitas dan akses yang memadai, untuk ikut berinteraksi, apalagi berkompetisi masuk dalam kancah persaingan memperebutkan pasar dan akses modal (*capital*), yang mana menjadi syarat utama untuk

membangun dan mengembangkan usaha (ekspansi).

Namun di luar dugaan banyak pihak, bahwa usaha kecil yang dipaksa oleh keadaan untuk mampu berdiri sendiri ini, ternyata dapat bertahan dalam mengarungi krisis ekonomi selama tiga tahun belakangan.

Meskipun demikian, beberapa persoalan mendasar dan utama dalam perkembangan usaha kecil adalah yang sebelumnya juga telah ada dan melekat hingga saat ini terbatasnya pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan usaha kecil. Terutama di mata perbankan. Dimana seharusnya usaha kecil ini, juga mendapat perlakuan yang sama seperti sektor bisnis skala besar yang dianggap lebih modern itu. Ketidaksamaan perhatian dan fasilitas yang diberikan oleh lembaga pendanaan (perbankan), serta ketimpangan dan hambatan birokrasi, yang dihadapi usaha kecil dalam mendapatkan kredit sebagai motor penggerak usaha. Pada akhirnya, tentu saja akan mempersulit usaha kecil dalam berkembang. Apalagi untuk ekspansi dan bersaing.

Meskipun kendala permodalan ini dapat diatasi yang mungkin dengan mendapatkan pinjaman melalui cara-cara tradisional, yaitu melalui kerabat, tetangga, teman atau bahkan kepada tengkulak. Namun dalam tingkat persaingan usaha dan ekspansi akan mengalami kendala cukup serius. Akibat biaya modal (*cost of capital*) yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak akan mampu bersaing.

Adanya keinginan salah satu bank di Riau, yaitu Bank BNI yang secara gamblang —yang mana program itu, merupakan kebijakan dari Direksi Bank BNI— serta mengkampanyekan pengalokasian kreditnya kepada sektor

usaha kecil atau ritel, melalui program komunikasi Bank BNI peduli “si Kecil”. Merupakan peluang bagi usaha kecil untuk memanfaatkan program tersebut untuk pembiayaan dan pengembangan usaha. Namun tentunya, program tersebut tidak lantas hanya merupakan suatu program promosi saja oleh bank tersebut, yang pada akhirnya akan menyedot dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan hanya kepada pengusaha besar atau ke pusat, seperti banyak terjadi dalam kasus perbankan. Selain itu, keinginan pemerintah provinsi Riau untuk menyisihkan APBD 2001 sekitar 20 persen untuk skim kredit usaha kecil akan memberikan peluang untuk berkembangnya usaha kecil di Riau. Hal ini juga tentu merupakan suatu peluang bagi usaha kecil di Riau di tahun mendatang.

Provinsi Riau yang memiliki pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelum krisis, yang rata-rata sebesar 9 persen pertahunnya, memiliki jumlah usaha kecil lebih dari 1 juta unit, yang sebagian besar berada di kabupaten Bengkalis dan Kampar. Usaha-usaha kecil ini, ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi Riau, yaitu lebih dari 20 persen. Sehingga memang sudah sewajarnya pemerintah di daerah serta perbankan memberi perhatian yang lebih serius dalam membina dan mengembangkan usaha kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau.

Beberapa hal pokok yang perlu menjadi perhatian dan masukan kepada perbankan, termasuk juga Bank BNI. Agar hendaknya dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian skim-skim kredit yang diberikan kepada usaha kecil. Dalam artian masih dalam batas-batas yang tidak

melanggar ketentuan asas perkreditan. Selain itu juga mampu memberikan layanan yang *customize* kepada usaha kecil, yang tersebar cukup luas di berbagai daerah di propinsi Riau. Apalagi dengan rencananya untuk memberikan kredit mikro (*micro financing*) yang nyata-nyata akan melayani pengusaha kecil yang mungkin juga belum familiar dengan bank.

Pemberian pendampingan manajemen terhadap usaha kecil, juga akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, serta produk yang dihasilkan usaha kecil sehingga mampu menembus pasaran ekspor.

Sebenarnya, banyak produk hasil usaha kecil yang bisa bersaing di pasaran ekspor, kalau saja mampu dikelola dengan baik, ditambah pemberian modal kerja yang cukup. Pendampingan ini tentu akan memerlukan rekrutmen sumberdaya manusia (SDM), yang harus memiliki komitmen dan kompetensi serta integritas yang cukup baik dan memahami tugas mereka.

Dengan pengalokasian 35 persen dari total kredit Bank BNI ke sektor usaha kecil atau ritel ini pada tahun 2001 mendatang, hendaknya jangan setengah hati. Ketika pengalokasian masih hanya sekitar 20 persen lebih, Bank BNI mampu meralisasikan dengan baik.

Namun ketika ditambah pengalokasiannya, justru realisasi menjadi semakin berkurang. Namun, yang jelas keinginan BNI untuk memberikan perhatian kepada usaha kecil patut disambut baik. Tentu alangkah jauh lebih baiknya jika ditambah dengan secara transparan mengumumkan berapa alokasi, serta berapa jatah alokasi kredit usaha kecil yang akan dikucurkan untuk usaha kecil di Riau. Soalnya

beberapa Bank di Riau nampaknya masih enggan atau “tabu” untuk mengumumkan alokasi kreditnya kepada masyarakat umum. Untuk seluruh bank di daerah (Riau) sistem perbankan tampak harus segera diubah. Hal ini sejalan dengan akan diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 mendatang. Yaitu dengan membuat dan menetapkan dalam sebuah perangkat peraturan yang menjadikan perbankan di daerah, menjadi sistem-sistem unit, bukan lagi sistem cabang atau wilayah yang selama ini hanya menyedot dana dari daerah ke pusat. Dengan cara seperti ini diharapkan aliran dana yang mengalir ke pusat dapat dibatasi. Sehingga dana perbankan yang ada di daerah, yang *notabene* adalah dana masyarakat daerah itu sendiri (dana pihak ketiga), dapat dioptimalkan untuk pembangunan ekonomi daerah.***

Model “Community Development” *(Untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Riau)*

MASYARAKAT Riau sangat majemuk, baik secara struktural maupun spasial. Suku bangsa yang hidup dan sudah turun temurun menjadikan bumi Lancing Kuning ini sebagai tempat bernaung sangat kompleks. Mulai dari orang Aceh sampai ke Irian Jaya dapat ditemukan di Riau. Bahkan bumi ini sempat dijuluki internasional mini. Secara geografis karakteristiknya juga sangat beragam. Kutub besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Wilayah kepulauan terbagi lagi menjadi masyarakat pantai dan perkotaan. Sedangkan wilayah daratan diklasifikasi menjadi tiga yakni masyarakat yang hidup di daerah aliran sungai, masyarakat pedalaman (termasuk suku-suku terbelakang), dan masyarakat perkotaan (termasuk wilayah desa di pinggir jalan-jalan angkutan darat).

Masing-masing komunitas dengan sendirinya mempunyai permasalahan yang beragam meskipun secara

umum persoalan kemiskinan dan ketidak-merataan pendapatan menjadi dominan. Solusi untuk keluar dari setiap permasalahan yang membelenggu setiap segmen dan komunitas tersebut dengan sendirinya tidak dapat digeneralisasikan. Tentunya harus ada perlakuan-perlakuan yang berbeda satu sama lain. Lebih penting lagi, keputusan untuk memilih sebuah perlakuan yang sesuai tidak dapat dibuat secara “tuntas”. *Bottom up planning* secara membabi buta juga tidak mungkin dipedomani mengingat keterbatasan SDM baik yang ada di setiap komunitas tadi maupun aparat pemerintahannya.

Mencari sebuah model *community development* dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat (*poverty reduction*) di Riau bukanlah pekerjaan yang gampang. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara sporadis sebagaimana yang dilakukan selama ini justru hanya akan menyebabkan masyarakat terimbas persoalan baru, khususnya berkaitan dengan sikap mental dan kesadaran terhadap keberadaannya sebagai anggota komunitas.

Tersedianya sumberdaya alam (SDA) yang melimpah dapat saja menyebabkan etos kerja rendah bila kesadaran akan pemilikan dan pemanfaatannya tidak bertaut-suai dengan visi selayaknya masyarakat Riau di masa datang. Konflik justru akan makin menguat kepermukaan bila faktor keadilan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus lebih dikedepankan. Eskalasinya akan makin cepat dan akan berakselerasi keseluruhan arah seandainya para “provokator” mulai menghembuskan isu-isu primordial yang sempit dan tidak sinerjik bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi bila membiarkan

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau melakukan program pengembangan masyarakat secara sporadis dan menurut persepsi mereka masing-masing. Akan timbul suatu kondisi masyarakat yang saling “berebut kue” yang justru kontra produktif bagi program itu sendiri.

Landasan berpijak untuk melahirkan model pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kompleksitas Riau tersebut haruslah dimulai dari masyarakat itu sendiri. Melalui pendekatan partipatoris para perencana dan pelaksana pembangunan di Riau harus mampu mengkristalisasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara baik. Berbagai kebutuhan harus dapat dipilah dari dimensi waktu sehingga diperoleh mana persoalan yang harus dicari solusinya dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Terdapat beberapa masalah kunci yang dapat dijadikan landasan berpijak dalam pengembangan masyarakat di Propinsi Riau. *Pertama*, penipisan sumber daya alam (SDM) yang tidak bisa diperbaharui akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol. Menengok ke belakang sangat dituntut adanya pelembagaan perlindungan untuk membangun kelestariannya. Sementara itu dihadapkan ke masa depan mengharuskan pengenalan inisiatif mata pencaharian alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungannya pada satu sektor mata pencaharian yang ada sekarang. Petani karet yang sangat terikat pada struktur pasar oligopsoni tidak mungkin terlepas dari cengkraman “toke” jika hanya semata-mata mengandalkan karet sebagai sumber pendapatan. Demikian juga masyarakat petani (*coastal community*) yang sangat

terbelenggu oleh “toke” ikan mereka.

Kedua, kemiskinan yang dapat semakin merem bes dan kerugian-kerugian social yang timbul sebagai akibat dari upaya mempertahankan kehidupan. Memandang kebelakang hal ini lahir dari ketimpangan perlakuan terhadap berbagai kelompok masyarakat sehingga aspek keadilan terabaikan. Masyarakat menjadi skeptis dan apriori yang pada akhirnya bermuara pada kecurigaan mereka pada pihak pemerintah dan pihak lain, meskipun mereka memiliki niat baik. Ke depan, masyarakat seakan lepas kendali dan terhanyut dengan nuansa reformasi. Segala beban yang menghimpit mereka selama ini diteriakkan yang terkadang mengarah pada pelampiasan dendam bila tidak disikapi secara bijaksana.

Sebenarnya kedua masalah di atas saling berkait-kelindan dan membentuk lingkaran setan. Terapi jangka pendek dalam bentuk *cras program* yang berlebihan hanya akan membentuk masyarakat “melucur” yang hanya tahu memenuhi kebutuhan sesaat mereka. Masyarakat seperti itu sangat berbahaya bagi integritas bangsa dan khususnya propinsi Riau. Strategi dan program jangka menengah dan jangka panjang harus dipilih secara tepat untuk mengimbanginya terutama rekayasa sosial yang mengarah pada penciptaan masyarakat madani (*civil society*).

Ruang lingkup program pengembangan masyarakat di Riau yang utama adalah mengontrol usaha eksploitasi SDA dalam batasan-batasan yang sesuai dan ramah lingkungan. Pengontrolan dilakukan dengan menciptakan legalitas yang dikristalisasikan dari masyarakat itu sendiri, baik mitos maupun legendanya. Pemda harus proaktif

melegitimasinya menjadi perundang-undangan daerah, disamping menentukan sendiri substansi hukumnya, tanpa harus terlalu terikat dengan kepentingan-kepentingan individu pemerintah pusat.

Masyarakat selanjutnya harus diberi akses untuk menuju mata pencaharian alternatif tau menambah kesempatan memperoleh pendapatan tambahan. Caranya adalah dengan menata ulang kepemilikan tanah dan peruntukannya, perbaikan infrastruktur sosial ekonomi, penataan lembaga-lembaga masyarakat untuk memperkuat posisi mereka. Sudah tidak zamannya lagi keberadaan institusi masyarakat baik formal maupun non-formal hanya untuk kepentingan pemilihan bupati dan gubernur.

Untuk mencapai sasaran dalam ruang lingkup di atas, pengembangan masyarakat harus ditempuh melalui beberapa komponen strategi yang mendasar. *Pertama*, melakukan pengkajian dengan pendekatan partisipatoris untuk menemukan dan mengidentifikasi secara jelas kebutuhan masyarakat yang spesifik. Masyarakat harus dapat diajak untuk mengatur dirinya sendiri dengan segala apa yang dimilikinya. Pemerintah dan LSM dalam hal ini hanya sebagai pendamping atau advisor. *Kedua*, penerapan atas aktivitas-aktivitas program secara fleksibel pada setiap lokasi komunitas masyarakat dengan menentukan alternatif berdasarkan kebutuhan spesifik tempatan.

Ketiga, memperkuat badan-badan pemerintah lokal (terutama desa/kecamatan) dan institusi-institusi non-formal yang ada di tengah masyarakat untuk mampu merespon dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunannya. Statistik desa yang tidak akurat selama ini telah banyak

menyebabkan kegagalan ber bagai program yang dilaksanakan. *-Terakbir*, pemben tukan koordinasi dan kerja sama yang lebih dekat antar institusi-institusi yang terkait dalam konteks tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Independensi setiap institusi harus dijaga agar keberpihakan yang kontraproduktif terhadap implentasi program tidak muncul. Apalagi mengubahnya dari “*Jaring Pengaman Sosial*” menjadi “*Menjaring Pengaman Sosial*” masyarakat.***)

Mengapa Persepsi tak Pernah Sama? *(Menggugat Kebijakan Community Development Riau)*

TUHAN telah melimpahkan kekayaan sumberdaya alam (SDA) pada propinsi Riau yang tidak terhingga nilainya. Di perut bumi PT. CPI saja telah mengisap kekayaan tersebut + 680.000 barrel minyak setiap hari. Bila harga minyak dipatok US \$ 8,160.000 setiap hari. Dalam diskusi dengan mahasiswa Fekon Unri, pihak manajemen PT. CPI menerangkan keuntungan yang dibawa pemilik modal Caltex ke negeri Paman Sam sana sekitar 6%. Berarti negeri Monica Lewinsky sebagian “doku” sebesar \pm US \$ 519,600 setiap hari dari Propinsi Riau. Bila nilai tukar rupiah dipatok Rp. 7.500/dolar nilainya mencapai Rp. 3.897.000.000. Jumlah yang sangat mencegangkan di tengah-tengah 1.5770.475 jiwa masyarakat miskin di Riau.

Sudah sejak lama masyarakat Riau “berteriak” agar rezeki tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakatnya. Mulai dari tuntutan 1% pada zaman gubernur Arifin Achmad sampai dengan tuntutan 10% uang

bergaung di tengah reformasi sekarang. Pihak pengusaha terutama PT. CPI menanggapi tuntutan masyarakat dengan mengem bangkan program *community development*.

Secara konsepsional menurut mereka programnya telah sangat baik. Pola pendekatannya berpijak pada pengembangan fisik ke SDM yang mulai dari sistem donasike sistem partisipasi. Tetapi setelah sekian lama berjalan, program ini menghadapi kendala klasik yakni adanya perbedaan persepsi antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, disamping kendala-kendala internal yang ada pada kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa persepsi tak pernah bisa sama?

Landasan Berpijak

Tidak sulit mencari sebab masalah terdapatnya perbedaan persepsi antara masyarakat tempatan dengan pihak-pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. *Kesalahan pertama*, tentu terletak pada pemerintah Indonesia sendiri. Selama 32 tahun tirani kekuasaan yang dibangun rezim orde baru telah mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan manusia yang hanya menjadi retorika politik yang implementasinya tidak lebih dari “memperdaya” masyarakat dan mengekangnya dengan nuansa ketergantungan dan kemiskinan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para “pemburu rente” untuk mengeruk/ memanfaatkan kesempatan. Kolusi terang-terangan tidak lagi “malu” untuk diterapkan. Untuk mengeluarkan data saja pihak PT. CPI harus mendapat izin dari Pertamina. Ini tentu memberikan peluang subur bagi tumbuhnya KKN karena masyarakat tempatan tidak dapat mengakses data

untuk perjuangan mereka.

Kesalahan kedua, yang merupakan turunan langsung dari kesalahan pertama adalah aspek keadilan. Persepsi masyarakat tempatan tidak mungkin sejalan dengan perusahaan bila mereka menilai tidak adanya keadilan dalam alokasi dana untuk pengembangan masyarakat dengan dana yang dihisap dari bumi mereka sendiri. Contoh ironis dapat diamati di Kabupaten Bengkalis APBD mereka hanya berjumlah lebih kurang Rp. 77 milyar. Sedangkan devisa yang dihasilkan dari kabupaten tersebut dari sektor migas dan non-migas mencapai lebih kurang mencapai Rp 320 milyar. PAD Kota Batam memang terbesar di antara seluruh kabupaten di Propinsi Riau, tetapi uang yang dihisap oleh pusat melalui Otorita-nya (yang jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1979) jauh dan teramat jauh lebih besar dari total PAD tersebut.

Kesalahan ketiga, adalah kepedulian. Masyarakat tempatan tidak akan berteriak jika para pengusaha mau peduli akan lingkungannya. Sulit bagi masyarakat menerima kenyataan bila dalam perut ikan yang ditangkapnya penuh dengan serbuk gergaji, air sungainya tercemar logam-logam beracun, selat-selatnya digenangi limbah minyak, dan hamparan pasirnya menjadi danau-danau nyamuk. Belum lagi termasuk jalan raya yang menjadi "bencah" hutannya yang tidak lagi ramah, tetapi memuntahkan asap yang menyesakkan dada.

Kesalahan berikutnya, adalah keterlibatan. Jumlah tenaga kerja masyarakat tempatan hanya hanya 80 orang dari 10.000 lebih tenaga kerja yang ada diperusahaan tentunya bukan persoalan "etos kerja" masyarakatnya. Jumlah itu

hanyalah “tumbal” untuk melepaskan pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat tempatan dalam menyerap tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Belum lagi soal pembebasan lahan yang ditentukan sepihak oleh kolusi pengusaha dengan penguasa. Keterbelakangan masyarakat bersinerji dengan keterkungkungan mereka dalam tatanan negara yang tidak demokratis melahirkan *bargaining position* mereka yang amat rendah. “ganti-rugi” tidak pernah beralih menjadi “ganti-untung”.

Berpijak pada kesalahan-kesalahan di atas tentunya tidak sulit untuk memetakan persepsi masyarakat tempatan, sehingga para pengusaha dan pengusaha dapat mengimplementasikan program pengembangan masyarakat yang berkesesuaian dengan mereka. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan dengan program perusahaan, tetapi perusahaanlah yang mesti menyesuaikan dengan program-program mereka dengan kebutuhan masyarakat. Perlu juga dicatat bahwa kebutuhan masyarakat bukanlah keinginan-keinginan yang terlontar secara parsial dari sekelompok masyarakat. Kebutuhan masyarakat harus lahir dari tetesan visi dan misi pengembangan masyarakat tempatan secara strategis dan rasional. Membantu Unri “biji kacang kedelai” dan memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk ber-KKN di lokasi transmigrasi bukanlah berarti memenuhi kebutuhan strategis dari Unri sebagai universitas negeri satu-satunya di bumi Lancang Kuning ini.

Prinsip Dasar dan Pemberontakan

Program pengembangan masyarakat di Propinsi Riau tidak lagi dapat ditawar-tawar urgensinya. Akibat kerisis

moneter yang terjadi sejak bulan Juli 1997, di Kotamadya Batam saja jumlah penganggurannya telah meningkat menjadi lebih dari 200 %. Secara umum di Propinsi Riau terjadi lonjakan pengangguran mencapai 141,24 % (*hasil penelitian BPE – PDU FE – Unri*). Dasar berpijak program pengembangan masyarakat di Propinsi Riau tentunya harus diletakkan pada kondisi-kondisi terbaru perkembangan masyarakat tersebut. Artinya di samping dituntut aspek transparansi, keadilan, kepedulian, dan keterlibatannya, dukungan informasi yang cukup amatlah diperlukan.

Pemerintah daerah, sambil menunggu pengesahan Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dapat saja membuat perda-perda yang mampu mengikat para pengusaha untuk lebih peduli dan adil. Ini memang sebuah “pemberontakan” tetapi bukan gaya Timor Timur dan Aceh. Strategi pengembangan masyarakat dengan visi dan misi yang jelas fokus programnya yang utama tidaklah boleh terlepas dari “pemaksaan” pemerintah Riau kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau untuk memasukkan prosentasi *cost recovery* dari pendapatan yang diperolehnya. Kedua membebaskan Pulau Batam dari “penjajahan” pemerintah pusat dengan konsep Otoritanya. Terakhir, pemekaran kabupaten dan bila perlu Propinsi Riau dibagi menjadi dua, yakni Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Tanpa semua itu apapun yang namanya *community development* di propinsi ini hanya akan merupakan pelepas dahaga sesaat dari masyarakat yang kehausan.***

APEC, Industri Kecil, dan Kesiapan Birokrasi

PERTEMUAN puncak para pemimpin ekonomi APEC (AELM) di Bogor, 15 November 1994, melahirkan satu deklarasi yang sangat penting, yakni peneta pan liberalisasi perdagangan dan jadwal (*time table*) untuk mencapainya di kawasan Asia-Pasifik. Deklarasi ini merupakan rencana dari arah masa depan kerjasama ekonomi yang akan meningkatkan prospek dari pertumbuhan yang seimbang, terakselerasi dan adil, tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga di seluruh dunia. Tujuannya antara lain adalah memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik dan mengintensifikasi kerjasama pembangunan Asia-Pasifik, laju implementasinya akan memper hitungkan tingkat perbedaan ekonomi dari anggota-anggota APEC dengan perekonomian maju dan industri baru akan mampu mencapai perdagangan dan investasi bebas selambatnya tahun 2010, dengan

perekonomian berkembang mencapainya paling lambat 2020 .

Ancaman atau peluang?

Kesepakatan yang lahir dari pertemuan di Bogor tersebut didasari visi yang sangat ideal, yakni mengupayakan pemecahan yang bersifat kooperatif bagi tantangan di wilayah Asia-Pasifik yang berubah cepat dengan perekonomian global, mendukung perekonomian dunia yang meluas dan membuka sistem perdagangan multilateral. Disamping itu juga, meneruskan penurunan hambatan perdagangan dan investasi guna memungkin barang, jasa dan modal mengalir bebas di antara perekonomian negara-negara APEC. Termasuk pula menjamin rakyat menikmati keuntungan dari pembangunan ekonomi, perbaikan pendidikan dan pelatihan, mengaitkan perekonomian antar anggota APEC melalui kemajuan dalam telekomunikasi dan transportasi dan menggunakan sumber-sumber secara berkesinambungan .

Bagi Indonesia, khususnya Riau, kesepakatan APEC dapat menjadi peluang yang menjanjikan harapan untuk kemajuan, tetapi dapat pula menjadi ancaman yang sangat serius. Adanya liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik akan membuka kesempatan ekspor seluas-luasnya bagi produk-produk hasil industri dan jasa daerah Riau ke negara-negara tersebut. Melalui pengembangan Sijori dan Otorita Batam serta rencana pengembangan Pulau Natuna dengan penambangan gas alamnya, merupakan kesempatan yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat Riau.

Dari keadaan tersebut dapat dipacu peningkatan kualitas dan kreativitas masyarakat, sehingga mereka tidak tenggelam oleh arus globalisasi yang akan datang. Sebagai pintu gerbang yang sangat potensial daerah Riau memiliki akses yang sangat besar untuk memanfaatkan era liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Namun sebaliknya, seandainya masyarakat Riau terlambat mengantisipasi, peluang dari adanya liberalisasi perdagangan produk jasa serta investasi modal tersebut akan menjadi ancaman yang serius. Kesempatan bagi masuknya produk-produk asing telah di buka seluas-luasnya. Seluruh sektor ekonomi dapat dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi asing yang memiliki kemampuan yang lebih baik. "kue lapis" yang selama ini beredar di pasar yang dibuat produsen makanan Riau sudah akan berhadapan dengan produksi Singapore dan Malaysia jika memang negara tersebut menganggap produk itu layak untuk dijual ke Riau. Dalam skala yang lebih besar, jasa perbankan, asuransi, transportasi dan apa saja yang mungkin diekspor oleh negara-negara anggota APEC akan secara bebas untuk masuk ke Riau.

Satu-satunya jalan bagi produsen Riau untuk menghadapi kenyataan tersebut adalah melalui pendekatan keunggulan bersaing. Agar kinerja perekonomian Riau dapat bertahan, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap pelaku ekonominya untuk tidak saja berfokus kepada pasar tetapi juga berorientasi pada pesaing. Persyaratannya adalah peningkatan kualitas (*quality improvement*) disegala aspek. Pertanyaannya; sudah siapkah daerah Riau menghadapinya, dan strategi apa yang harus dikembangkan dalam mengantisipasi perubahan tersebut?

Industri Kecil

Dalam rangka deklarasi APEC juga ditekankan bahwa program tersebut mencakup peningkatan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui kerja sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai langkah meningkatkan perusahaan kecil. Bila ditelaah apa yang dikatakan John Naisbitt dalam buku-nya *Global Paradox*, ternyata dalam dunia yang semakin mengglobal perusahaan kecil akan semakin kuat. Ini terjadi bila perusahaan tersebut makin efisien dan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Persoalan mutu akan semakin mudah ditangani bila perusahaan tidak terlalu besar, karena atribut perusahaan kecil (seperti kegesitan, kecepatan dan koresponsipan pelanggan) dapat dipadukan secara baik.

Di Riau, berdasarkan data tahun 1993, terdapat sebanyak 7697 unit usaha kecil, yang terdiri dari 33,05 persen usaha pangan, 12,76 persen usaha sandang dan kulit, 22,75 persen. Usaha kimia dan bahkan bangunan dan 13,72 persen usaha kerajinan dan umum, serta 17,72 dan unit usaha logam. Jumlah unit usaha tersebut jika dibandingkan dengan tahun 1990 meningkat sebesar 7,0 persen.

Nilai investasi yang ditanamkan dalam industri kecil di daerah Riau tahun 1990 adalah sebesar Rp. 38.649.515.000 dan tahun 1993 naik menjadi Rp. 53.341.390.000 atau sebesar 27,54 persen. Sedangkan nilai produksi tahun 1990 adalah sebesar Rp. 93.707. 579.000, dan tahun 1991 sebesar Rp. 153.089.746.000, atau naik sebesar 38,79 persen.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan masih belum efisiennya keberadaan industri kecil di daerah Riau. Serapan tenaga kerja pada tahun 1990 adalah sebanyak 27.449 or-

ang dan tahun 1993 sebanyak 30.533 orang, atau naik sebesar 10,10 persen.

Mengingat tantangan yang cukup serius yang harus dihadapi dalam kerangka APEC dan masih tersedianya waktu sekitar 25 tahun lagi untuk memajukan industri kecil yang efisien dan mampu bersaing, maka sudah saatnya program peningkatan kualitas berdasarkan pendekatan “budaya mutu” mulai diterapkan. Meskipun secara eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi relatif sama, namun kekuatan dan kelemahan internal memiliki keadaan yang berbeda dalam menentukan strategi usahanya. Pengenalan dan pelatihan standar mutu yang berlaku secara global harus sudah dimulai dari sekarang, agar mampu diimplementasikan secara berangsur-angsur, dan sampai pada waktu yang menentukan, industri kecil Riau sudah memiliki kerangka acuan yang jelas dalam mengantisipasi persaingan yang kian tajam. Gerakan mengenai “budaya mutu” sesuai standar internasional harus dilembagakan dalam setiap dinamika dunia usaha dan masyarakat daerah Riau.

Kesiapan Birokrasi

Upaya memasyarakatkan “budaya mutu” sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat birokrasi yang ada di daerah Riau. Faktor manajemen dalam organisasi birokrasi merupakan pendorong utama. Melalui komitmen dan komunikasi keseluruhan masyarakat khususnya dunia usaha. Termasuk pula pada setiap unit-unit pelaksana teknis dengan jajaran pemerintahan. Aparat harus semakin responsif terhadap perubahan lingkungan dunia usaha dan makin mampu memahami keberadaan dunia usaha dalam

menggerakkan roda pembangunan.

Pembagian peran yang seimbang pada setiap pelaku ekonomi dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi mereka untuk bersaing secara wajar akan secara tidak langsung mendorong pelaku ekonomi tersebut untuk semakin berpegang pada kerangka kualitas (*quality improvement*).

Komitmen politik dalam bentuk konsisten kebijaksanaan dalam bidang pendanaan, infra struktur dan stabilitas pasar serta pembinaan, akan mempercepat perkembangan dunia usaha, khususnya industri kecil. Kajian ulang terhadap peraturan dan birokrasi yang tidak diperlukan mutlak dilakukan agar efisiensi dan produktifitas industri dapat ditingkatkan.

Di samping itu ketegasan yang tidak memihak perlu semakin dilembagakan pada setiap aparat untuk meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mereka yakin bahwa peluang yang terbuka akan dapat dimanfaatkan secara baik. Pemikiran dan tindakan yang proteksionisme dalam pelayanan lebih ditekankan melalui peningkatan sumberdaya manusia, dengan jalan implementasi program pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan. ***

Membakukan Peran Usaha Kecil

PEMBANGUNAN yang dilakukan di Indonesia telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kalaupun tidak dapat dikatakan melenceng dari apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, banyak pakar dan masyarakat umum mulai merasakan bahwa hasil yang telah dicapai selama ini memiliki ketimpangan—ketimpangan yang mendasar dan substansial. Terutama sekali bila dikaitkan dengan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

Sampai akhir Pelita V apa yang telah dicapai dari proses pembangunan yang dijalankan menunjukkan fakta yang memerlukan pemikiran yang mendalam, usaha yang gigih, serta kesepakatan yang bulat dan seksama untuk menanggulangnya. Data yang di-keluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara yang miskin dengan tingkat pendapatan perkapita US\$ 675. Meskipun demikian ada penciptaan yang cukup

tajam pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana pada tahun 1970 adalah sebesar 60 persen, sedangkan tahun 1990 tinggal 15 persen.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia ditopang oleh keberadaan pengusaha kecil. Data terakhir menunjukkan jumlah pengusaha kecil di Indonesia mencapai 32,6 juta. Bila satu unit usaha kecil menghidupi satu keluarga dengan dua anak berarti jumlah jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari usaha tersebut mencapai lebih kurang 130,4 juta jiwa, atau lebih kurang 76,71 dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia (lebih kurang 10 persen) yang menikmati porsi yang amat besar dari hasil pembangunan, maka kenyataan yang digambarkan di atas merupakan sesuatu yang amat pahit. Hal ini jelas bila dikaitkan dengan apa yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dimaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa negara pemerintahan Indonesia dibentuk tidak lain adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk masa-masa yang akan datang negara Indonesia sepertinya punya niat yang sungguh-sungguh agar kenyataan tersebut dientaskan. Terbukti dengan disepakatinya GBHN 1993 oleh MPR yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi usaha koperasi, usaha negara dan swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak terutama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan

ekonomi melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembangunan usaha nasional harus dijaga penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Khusus mengenai pembinaan usaha kecil, usaha informal dan tradisional GBHN menekankan perlu ditingkatkannya pembangunan sarana dan prasarana usaha yang disertai dengan perbaikan iklim usaha yang mendukung. Agar usaha tersebut tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Amanat GBHN tersebut tidak lain merupakan misi utama yang diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangkaian strategis pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu pulalah presiden ditetapkan sebagai mandataris yang akan menjalankan misi dan strategi tersebut. Melalui segenap jajaran birokrasi pemerintahan yang ada harus ditetapkan program-program yang konstruktif dan aplikatif sehingga mengena pada arah yang ditetapkan seperti apa yang telah digariskan.

Masalah sekarang, siapakah jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia yang menerjemahkan keinginan tersebut ke dalam bentuk kegiatan yang betul-betul mampu mencapai sasaran yang ditetapkan?

Meskipun baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat, ternyata ada semacam kendala baru yang timbul di samping kendala yang sudah melekat dalam upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi. Pada dasarnya kendala

tersebut sudah merupakan sesuatu yang selama ini menjerat birokrasi pemerintahan Indonesia. Setiap departemen terkait seperti dijangkiti “demam pembinaan usaha kecil dan koperasi”. Akibatnya tidak jarang program yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut. Ego sektoral yang muncul dalam program pembinaan menyebabkan usaha kecil dan koperasi bagaikan “si kudung mendapatkan cincin”. Betapapun cantiknya cincin permata yang ia dapatkan, namun karena ia tidak mempunyai jari-jari tangan tempat ia memasangnya, maka ia hanya bisa *cengar-cengir* dengan cincin itu.

Pada dasarnya sekumpulan usaha kecil memiliki produk yang angat beraneka ragam. Oleh karena itu strategi pengembangannya akan berbeda untuk setiap produk dan lini produk yang dihasilkan. Dengan demikian peran setiap usaha kecil yang dibina akan berbeda-beda pula. Sebenarnya besar cakupan peran setiap usaha kecil tersebut di dalam lingkungan usahanya yang demikian kompleks, merupakan suatu aspek yang harus benar-benar yang harus dipahami oleh instansi pembina.

Departemen koperasi dan PKK harus mampu memberikan informasi yang akurat pada setiap lembaga lain yang akan ikut serta menyukseskan upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi tentang unit-unit usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan. Dasar pemikirannya harus berpijak pada pemikiran strategis dengan mengamati factor internal dan eksternal yang seksama dan teliti dari setiap unit usaha kecil yang akan dikembangkan akan lebih transparan dan baku.

Selanjutnya untuk setiap daerah tingkat II sudah selayaknya dibentuk suatu lembaga tersendiri yang bertugas mengkoordinir program pembinaan yang akan dilaksanakan. Lembaga tersebut merupakan *projec team* yang personalnya diambil dari berbagai instansi terkait, termasuk pula dari unsur perguruan tinggi. Akan sangat menguntungkan pula bila dalam *projec team* tersebut melibatkan unsur ABRI untuk memperkokoh proses pelaksanaan program.***

Prospek UKM Menghadapi Era Otonomisasi

MENDAPATKAN pelanggan dan sukses di pasar tidak hanya dapat ditempuh melalui inovasi baru. Mutu dari apa yang dihasilkan perusahaan dapat diperbaiki dengan menganalisa dan meniru keberhasilan perusahaan lain, baik pesaing yang menjadi pemimpin pasar dalam industri tersebut, maupun perusahaan lain pada bidang usaha yang berbeda.

Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) juga makin luas sejalan dengan diimplementasikannya UU No. 22 Tahun 1999. Itu berarti, kesempatan pelaku bisnis di daerah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah akan makin terbuka. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di daerah diasumsikan dapat lebih berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan dunia usaha lokal. Lingkungan bisnis akan lebih kondusif bagi perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di daerah.

Namun secara makro, daerah tidak bisa memberikan proteksi yang berlebihan. Bahkan proteksi mungkin tidak ada sama sekali dengan diberlakukannya pasar global melalui AFTA, APEC, dan WTO. Masuknya pengusaha dari luar ke daerah merupakan sebuah keniscayaan. Berarti pelaku bisnis lokal akan dihadapkan pada persaingan yang makin tajam. Pepatah mengatakan “di mana ada gula di sana ada semut”. Pepatah ini nampaknya berlaku bagi bisnis yang agresif untuk memanfaatkan peluang yang terbuka di mana saja, sepanjang itu memberi keuntungan yang wajar.

Konflik horizontal dapat terjadi bila pengusaha lokal hanya bertindak sebagai penonton. Uang yang beredar di daerah tidak mampu ditangkap dan peluang bisnis yang terbuka menjadi santapan orang lain. Maka kecemburuanpun akan timbul. Padahal kelemahan mereka sendiri yang menjadi penyebabnya. Keadaan ini jelas tidak produktif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bertahan di era global dan wahana demokrasi yang lebih luas akibat otonomisasi, memaksa pengusaha untuk melebihi meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi persaingan. Pelaku bisnis harus mampu menjadi *global strategic*, yakni memiliki kemampuan untuk menyusun strategi bisnis pada tataran global. Segala aspek lingkungan global harus mampu diantisipasi secara dini agar usaha yang dikembangkan tidak terjebak oleh lajunya dinamika bisnis itu sendiri.

Penting pula diperhatikan agar pelaku bisnis memahami pelaku politik yang berkembang, termasuk berbagai aturan hukum yang berlaku agar dapat memperkirakan berbagai

resiko yang mungkin timbul dari intervensi politik maupun aturan hukum yang dibuat penguasa. Kemampuan dalam menguasai teknologi juga harus ditingkatkan mengingat perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi ini merupakan ancaman yang serius bila tidak mampu memanfaatkannya sebagai alat untuk bersaing. Pengusaha lokal, khususnya UKM, juga dapat terjebak bila pemilihan teknologi yang akan digunakan perusahaannya tidak sesuai dan optimal. Hal itu dapat meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi perusahaan.

Berkait dengan SDM perusahaan, pengusaha harus benar-benar memperhatikan upaya penarikan karyawan yang berkemampuan tinggi. *Familiar system* tidak dapat lagi diandalkan untuk bersaing. Jika anggota keluarga yang ada dalam perusahaan tidak dapat ditingkatkan mutunya, maka penggantian mutlak untuk dilakukan dengan SDM yang lebih berkualitas. Selain itu, iklim yang mampu menciptakan semangat individu untuk berkreasi sesuai dengan kepentingan organisasi perusahaan harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

Untuk membekali para pengusaha lokal untuk menghadapi dinamika dunia bisnis mendatang, diperlukan adanya pemantapan dalam kompetensi inti mereka. Setiap pengusaha harus mampu menentukan keunggulan bersaing mereka dengan membangun kompetensi inti perusahaannya secara valid dan terlembaga dengan baik. Selanjutnya baru disusun strategi untuk menggunakan kompetensi inti tersebut di lapangan bisnis yang penuh dengan persaingan.

Pemahaman tentang mutu yang berkesesuaian dengan perkembangan dinamika konsumen mutlak pula dilakukan

secara berkesinambungan. Apabila pengelolaan untuk kinerja yang tinggi dan keunggulan kompetitif merupakan suatu isu utama, maka kualitas merupakan slogan dari tema tersebut. Pencapaian tujuan kualitas di semua aspek operasi semakin dianggap sebagai kriteria umum kinerja organisasional, baik dalam industri manufaktur maupun jasa.

Tuntutan perekonomian global yang kompetitif dan implementasi otonomi daerah di Indonesia merupakan pendorong penting dalam perlombaan menuju operasi kualitas yang menyeluruh. Bila UKM lokal tidak juga menyadari semua itu, maka konsekuensi logisnya adalah menjadi penonton yang kian terhimpit oleh kecanggihan pemain lain. Untuk itu, perlu kiranya diingat bahwa sesuatu yang membedakan perusahaan yang berhasil dengan yang tidak berhasil adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Di samping dapat mengatakannya, harus pula mampu melaksanakannya secara benar dan berkualitas.***

Sumber-sumber Tulisan

Bagian Satu:

Prospek dan Tragedi Perekonomian Riau

Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru (*Riau Pos*, 28/12/1999)

Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (1) (*Riau Pos*, 10/1/ 2001)

Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2) (*Riau Pos*, 11/1/ 2001)

APBN 2001: Implikasi “Pelecehan” Riau (*Riau Pos*, 2/3/2000)

IMS-GT dan Riau: Sebuah Perkawinan tak Seimbang (*Tabloid GENTA*, 17-23/9/1995)

Krisis dan Keterpurukan Investasi Riau (*Riau Pos*, 22/8/2000)

Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (1): *Mencermati “Deklarasi Bali”* (*Riau Pos*, 13/7/1995)

Catatan Kecil Untuk Kadinda Riau (2): *Bercermin pada “Kesepakatan Adelaide”* (*Riau Pos*, 13/7/1995)

Signifikansi Embargo Ekonomi Riau (*Riau Pos*, 27/1/2000)

Bagian Dua:

Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan atau Penjarahan?

Memberdayakan Ekonomi Rakyat: *Dalam Perspektif Adat Kuantan Singingi* (*Riau Pos*, 29/6/1999)

Signifikansi Industri Berbasis Rakyat (*Riau Pos*, 20/10/1999)
Siapa “Menjarah” Uang Rakyat Riau? *Implementasi Ekonomi Kerakyatan RAPBD Riau 2001* (*Riau Pos*, 12/3/2001)
“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (*Tabloid AZAM*, No. 33/Th. I/1999)
Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat (*Riau Pos*, 21/11/1999)
Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan Bersaing: *Renungan 52 tahun Indonesia Merdeka* (*Tabloid GENTA*, 17-23/8/1997)
IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjarahan Ekonomi (*Riau Pos*, 10/10/1994)

Bagian Tiga:

Masih Adakah Tempat Untuk “Sikecil”?

Secangkir Kopi, Segudang Informasi: *Kunci Sukses “Positioning” Usaha Kecil Menengah* (*Riau Pos*, 2/3/1999)
Mendukung Pemberdayaan UKM Riau (*Riau Pos*, 18/12/2000)
Model “Community Development”: *Untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Riau* (*Riau Pos*, 27/3/1999)
Mengapa Persepsi tak Pernah Sama?: *Menggugat Kebijakanaan Community Development Riau* (*Tabloid AZAM*, No. 8/Th. I/1999)
APEC, Industri Kecil dan Kesiapan Birokrasi (*Riau Pos*, 29/11/1994)
Membakukan Peran Usaha Kecil (*Riau Pos*, 19/9/1994)
Prospek UKM Menghadapi Era Otonomisasi *Tabloid Serantau*, No.35/April 2000.

Tentang Penulis

EDYANUS HERMAN HALIM, SE., MS dilahirkan di P. Aro Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, 8 Januari 1963. Menyelesaikan sarjana pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau (1987). Program S2-nya diraih pada Universitas Airlangga (1993), spesialisasi bidang Ilmu Manajemen. Pernah menjadi staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan (PSK) Unri (1986-1990); Ketua Badan Pengkajian Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha (BPE-PDU) FE Unri (1995-sekarang); Sekretaris Pusat Konsultasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (1995-1996); Sekretaris Jurusan Manajemen FE Unri (1996-1999). Kini menjadi Kepala Laboratorium Manajemen Keuangan dan Perbankan FE Unri dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Lembaga Penelitian (Lemlit) Unri, serta Kepala Pusat Studi Advokasi HAM Unri.

Suami dari Almarhumah Wulan Kartikasari ini, boleh dikatakan cukup *concern* dalam upaya pemberdayaan nasib rakyat kecil. Komitmen dan kepeduliannya untuk memberdayakan kaum *papa* tersebut ia buktikan lewat pemikiran-pemikiran bernasnya yang ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang dimuat di beberapa media massa lokal seperti Harian Pagi *Riau Pos*, *Suara Riau*, *Riau Mandiri*, Tabloid *AZAM*, dan Tabloid *GENTA* serta beberapa surat kabar lainnya. Tulisannya yang tajam dan berani dalam melihat fenomena sosial ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan

masalah nasib rakyat kecil tadi yang sering menjadi korban aparat birokrasi, banyak membuat orang mengacungi jempol padanya. Selain itu, puluhan tema judul penelitiannya juga sebagian besar lebih berorientasi kepada upaya bagaimana pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain konsisten di bidang kepenulisan dan penelitian, ayah dari dua anak ini juga aktif di berbagai organisasi-organisasi sosial, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Tercatat pernah menjadi pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pekanbaru (1987-1993); pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau (1988-1991); wakil sekretaris DPD I Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) Riau (1997-2002). Sekarang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Daerah Riau. Buku *Siapa Menjarah Uang Rakyat? Tragedi dan Upaya Pemberdayaan Perekonomian Riau Menuju Alaf Baru* ini merupakan hasil rangkaian karyanya yang akan disusul oleh empat buku berikutnya.***